

Percakapan dengan

## Mohammad Imam Aziz



**Mohammad Imam Aziz**, Dewan Pendiri Syarikat Islam. Ia juga ikut mendirikan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB Yogyakarta), tahun 1998, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS Yogyakarta) di mana ia pernah menjadi direktornya (1996-1998).

---

Para perumus teologi pembebasan dalam Islam meyakini bahwa realitas harus menjadi sesuatu yang direfleksikan sebagaimana yang diperlihatkan agama pada masa-masa awal kemunculannya. Dalam konsep negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi mencontohkan model masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama. Gambaran yang sangat demokratis. Problemnya, praktik demokrasi kita sekarang sama sekali belum memenuhi prasyarat paling utamanya, yaitu semua orang boleh berpendapat, dengan melalui mekanisme prosedural dan substansial sekaligus, juga mencapai rekonsiliasi atas trauma-trauma masa lalu segenap anak bangsa yang belum didamaikan.

*Dalam sejarahnya, sekularisme lebih dikenal sebagai pemisahan antara agama dan negara. Akibatnya, peran dan fungsi agama di tengah kehidupan masyarakat kian memudar. Dari sini kemudian muncul berbagai gerakan di mana agama berusaha ditampilkan kembali ke wilayah publik guna merespon persoalan kemanusiaan. Di Amerika Latin bermunculan teologi pembebasan. Di Islam juga sempat muncul gagasan serupa model Ali Syariati, Hasan Hanafi dan Farid Essack. Bagaimana pandangan Anda perihal pasang-surut peran agama dalam kehidupan masyarakat?*

Perkembangan teologi pembebasan di dalam Islam tak ubahnya seperti teologi kontemporer yang merumuskan konsep-konsep untuk menanggapi isu-isu riil. Konteks munculnya teologi pembebasan di Amerika Latin sendiri juga dalam rangka menanggapi isu riil: otoritarianisme dan kemiskinan. Permasalahannya, di Indonesia, hampir semua konsep mengenai apapun menjadi lemah. Katakanlah, sebagai contoh, konsep tentang buruh. Konsep buruh di Indonesia tidak seperti buruh di Eropa. Konsep buruh di Eropa tidak terjadi di sini. Demikian juga, konsep “revolusi buruh” tidak pernah terjadi di sini. Teologi pembebasan, di sini, juga menjadi lunak. Orang mengharapkan teologi pembebasan di Indonesia muncul dari Islam, karena kalau dilihat dari praksis, apa yang dialami oleh rakyat Indonesia, tak lain direfleksikan oleh pandangan teologinya. Di Amerika Latin, romo-romo Katolik bisa melakukan radikalisasi rakyat, bahkan mengesahkan penggunaan senjata. Di sini hal seperti itu tidak mungkin terjadi.

*Apakah menurut Anda agama pada dasarnya memiliki peran dan fungsi publik untuk selalu mencermati dan merespon isu-isu sosial seperti problem kemiskinan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya? Pasalnya, pada sisi lain, ada semacam kekhawatiran bahwa ketika agama dijadikan legitimasi untuk persoalan publik, agama dapat menampilkan wajahnya yang tidak santun, seperti pencabutan hak-hak sipil, pemicu konflik dan sebagainya. Apakah fungsi dan peran agama memang harus dipublikkan?*

Itu dua hal yang mungkin bisa dipilah-pilah. Di satu sisi agama mempunyai dimensi privat. Yakni penghayatan orang terhadap agamanya bersifat privat. Dalam diri kita yang sama-sama Islam saja, bisa berbeda-beda dalam penghayatannya. Namun, agama juga mempunyai dimensi

publik. Sebab, agama mempunyai perangkat analisis yang multi-interpretasi. Ini juga uniknya kitab suci. Para perumus teologi pembebasan sendiri meyakini bahwa realitas harus menjadi sesuatu yang direfleksikan sebagaimana yang diperlihatkan agama pada masa-masa awal kemunculannya. Islam sendiri dimulai dengan pembebasan orang-orang kelas rendahan yang tertindas, membangkitkan jati diri mereka sehingga memiliki harga diri yang sama dengan orang-orang lain. Agama tidak sekadar dipahami sebagai sesuatu yang mati. Selain tercakup pada teks, agama juga memiliki sisi historis yang selalu dinamis.

*Salah satu kecaman terhadap agama adalah bahwa dia kerap menyebabkan terjadinya konflik. Dalam pandangan Anda sendiri bagaimana menanggapi wajah ganda agama yang di satu sisi bisa diinterpretasikan sebagai ramah sosial, memihak yang lemah dan menghargai yang lain; tetapi pada sisi lain ditafsirkan secara eksklusif – gagasan tentang jihad, memerangi yang dianggap sesat dan kafir, dan seterusnya? Lantas bagaimana Anda menanggapi fenomena munculnya fundamentalisme agama?*

---

Dalam negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi telah mencontohkan bagaimana satu masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama tertentu. Sayangnya kemudian model negara Madinah Nabi itu ditafsirkan oleh umat Islam sekarang sebagai model negara Islam.

---

Saya melihat bahwa sebetulnya agama, pada awalnya, adalah satu cara berpikir. Yang menjadi problem apakah cara berpikir itu persis seperti yang teks katakan, tanpa interpretasi, atau kita mempunyai pilihan-pilihan atas teks sehingga bisa memilih cara berpikir yang memang sesuai bagi masing-masing konteks penafsir. Sebagaimana dideskripsikan dalam sosiologi pengetahuan, kalau latar belakang saya petani, cara berpikir saya akan secara otomatis juga seperti petani. Maka saya akan melihat al-Quran dengan *desentring*-nya lebih ke petani. Di situlah letak benturan-benturan penafsiran agama terjadi.

Saya tidak percaya bahwa al-Quran, dengan sendirinya, akan dapat membentuk orang. Bagi saya itu lebih sebagai perpaduan antara teks dengan pengalaman seseorang. Kitab suci memang bisa membentuk orang, tetapi pada diri setiap orang tetap mempunyai pilihan. Pemikiran seperti ini, kalau mau dikatakan subyektif, memanglah subyektif – tentunya bukan dalam hal yang bersifat ritual. Melihat begitu banyaknya tafsir al-Quran mengenai fikih dan sebagainya, di situ terlihat bahwa orang dibentuk pada situasi di mana dia hidup dan menjadikan teks sebagai pilihan untuk menjalani kehidupannya. Karena itu, fundamentalisme juga berkait erat dengan pilihan orang: apakah dia mau bersikap fundamentalis atau tidak, sebenarnya tergantung pada perkembangan orang tersebut.

*Selama ini banyak pihak memandang Anda sebagai orang yang konsisten mentransformasikan agama secara profetis. Ada sisi emansipatif dari agama yang harus diperjuangkan. Bagaimana cara Anda menerapkan agama pada model penafsiran sosial seperti itu?*

Pilihan-pilihan atas sikap beragama itu harus dilihat dari konteksnya. Saya sendiri harus dilihat latar belakangnya kenapa melakukan penafsiran demikian. Rumusan-rumusan sebagaimana yang terdapat dalam penafsiran saya tentang agama yang dikaitkan dengan problem sosial yang ada, sebenarnya semua sudah tersedia di kitab suci sendiri. Yang paling sulit bagi kita adalah bagaimana agar dapat memilih jalannya secara konsisten. Al-Quran sendiri menyebut pilihan jalan itu sebagai *subul*, (*Wa al-ladzîna jâhadû finâ lanahdiyannahum subulanâ*). Di situ dikatakan *subul* (bentuk jamak) bukan *sabîl* (tunggal). Artinya agama menyediakan banyak jalan dan pilihan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan banyak jalan. Hal seperti ini, menurut saya, menarik. Bahwa pilihan sifatnya eksperimental, itu pasti. Karena dalam Islam, kalau orang berjihad, salah pun tetap berpahala. Tuhan sangat adil. Itu sangat mendewasakan umat. Dalam konteks itulah saya bersikap terhadap fundamentalisme.

*Jika agama dalam konteks sosial merupakan interpretasi atau pilihan masing-masing orang, di sinilah negara, dalam hal ini negara modern, harus masuk untuk menjamin bahwa semua pilihan setiap orang akan aman dan dijamin hak-haknya, sehingga mereka dengan leluasa melakukan pilihan-pilihan atas*

*apa yang diyakininya. Menurut Anda hubungan seperti apakah yang harus dibangun antara negara dan agama?*

Kalau dasarnya adalah pilihan-pilihan pribadi maka memang harus ada aturan dasar yang disepakati. Dulu, ketika Nabi mempunyai eksperimen negara Madinah, juga terlebih dahulu dilakukan kesepakatan-kesepakatan. Perintah membuat negara Madinah sendiri tidak terdapat dalam al-Quran. Tetapi karena tuntutan sosial politik, Nabi kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat model seperti itu, meski mungkin juga tidak membuatnya secara sengaja. Namun prinsip dari negara Madinah model Nabi itu adalah bahwa pluralitas harus dijaga dan harus ada dasar yang disepakati bersama. Dasar-dasar itulah yang harus diambil dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu dasarnya adalah apakah agama tertentu dijadikan landasan bersama oleh semua orang atau tafsir atas agama tertentu akan dijadikan pedoman bagi semua orang. Melihat eksperimen Nabi di Madinah, ternyata pilihan itu tidak dilakukan. Memang semua orang memiliki agama sendiri-sendiri, tapi *platform* bersama yang disepakati adalah bahwa keamanan dan kesejahteraan harus dijaga dan diwujudkan secara bersama-sama.

Dalam negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi telah mencontohkan bagaimana satu masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama tertentu. Sayangnya kemudian model negara Madinah Nabi itu ditafsirkan oleh umat Islam sekarang sebagai model negara Islam.

Menurut saya, negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ

---

Menurut saya, negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.

---

terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.

Jadi, mari kita kembali kepada dasar agama yang bersifat privat. Bagi saya setiap orang bisa menafsirkan agamanya dengan bermacam-macam. Setiap orang boleh hidup dengan penafsiran sendiri-sendiri. Sungguhpun demikian, pada taraf tertentu masing-masing individu harus taat pada kesepakatan bersama. Kalau sekarang agama-agama memiliki caranya sendiri dalam menerjemahkan bagaimana kesejahteraan ekonomi diperoleh, silakan masing-masing dikedepankan. Akan tetapi tetap harus ada kesepakatan tertentu agar sisi ekonomi itu bisa berjalan untuk semua orang.

*Untuk konteks Indonesia, di mana masyarakatnya sangat plural, bagaimana Anda menerjemahkan prinsip-prinsip agama sehingga menjadi konsensus yang adil untuk bersama, tidak terjadi kesepakatan yang sepihak dan terlampaui mementingkan yang mayoritas ketimbang mengkomodifikasi minoritas?*

Prinsip dasar kesepakatan yang adil untuk semua harus selalu diperjuangkan karena kita berkembang dalam situasi yang mungkin masing-masing kelompok mempunyai posisi yang kuat. Tentu saja, masyarakat Islam, kelompok agama lain, dan kelompok adat pun sama-sama kuat. Mempertemukan kelompok-kelompok itu secara bersamaan memang sangat susah. Di sisi lain, semua orang berhak memperjuangkan pilihannya.

Dalam konteks itu sebetulnya saya menganggap bahwa negara kita belum final. Prinsip-prinsip dasar yang semestinya disepakati masih sangat lemah. Implementasi suatu rumusan bersama dari soal ekonomi, ketahanan-keamanan, pengelolaan kesejahteraan, sampai persoalan politik, memang tidak akan pernah final. Namun yang paling penting semua itu dijamin. Makanya, sekali lagi, bagi saya yang terpenting adalah semua aspirasi harus dijamin sampai yang fundamentalis sekalipun. Oleh karena itu, harus disepakati sejak awal bahwa tidak boleh memperjuangkan semua hal dengan kekerasan. Hal inilah yang selama ini terlewatkan. Bagaimana caranya supaya kita sepakat bahwa siapapun, kalau mau memperjuangkan sesuatu, tidak boleh memakai kekerasan, baik kelompok masyarakat atau negara sekalipun.

*Bagaimana jika lewat jalur yang demokratis, seperti membuat partai, mengikuti pemilu, menetapkan perda syariah atau perda Anti-Maksiat, yang sama sekali tidak dengan kekerasan, namun dalam praktiknya, ketika mereka berkuasa secara politis, kemudian hanya menjadikan nilai-nilainya sendiri sebagai nilai utama dan paling luhur, sehingga nilai-nilai lain, yang berbeda, tidak bisa muncul dan terpinggirkan; lantas bagaimana Anda melihat kecenderungan seperti itu yang tengah menggejala di berbagai daerah?*

Persoalannya, kenapa hal tersebut sampai bisa terjadi? Karena kondisi seluruh warga yang ada belumimbang. Demokrasi yang dipakai oleh kita sekarang ini, pada hemat saya, sama sekali belum memenuhi prasyarat paling utamanya, yaitu semua orang boleh berbicara dan berpendapat. Kalau ada seseorang atau kelompok yang mau berjuang lewat partai politik, maka yang lain pun harus diperbolehkan.

---

Kalau kita menginginkan kebebasan yang sebenarnya, maka cara satu-satunya adalah dengan membiarkan orang lain untuk memiliki kebebasan yang sama.

---

Sekarang masih sangat banyak elemen atau orang-orang yang tidak boleh berpolitik. Orang-orang yang disebut sosialis, komunis, kalangan masyarakat adat, masih belum mendapatkan tempat dalam partisipasi demokratis. Artinya berjuang lewat demokrasi seperti sekarang ini belum sah sebelum semua orang, pendapat atau aspirasi dalam bentuk apapun diperbolehkan tampil secara adil.

Bagi saya, kalau sekarang ada yang berjuang lewat perda dan sebagainya, kemenangannya itu sama sekali belum sah. Saya tidak melihat dari sisi hukumnya, tapi dari hak asasi manusianya, di mana pada kenyataannya masih banyak pihak yang direpresi. Pihak yang satu merepresi pihak yang lain, misalnya, lantas yang kuat dan dominan berjuang, sehingga wajar kalau bisa menang. Seolah-olah sudah melalui mekanisme yang demokratis, padahal sama sekali belum.

*Kalau kita melihat beberapa kasus di Eropa, seperti Jerman yang secara kuantitatif telah memiliki nilai demokrasi yang tinggi, tetap melarang munculnya Nazi. Kasusnya agak mirip dengan di Indonesia. Karena trauma akan masa lalu, orang-orang yang disebut sosialis, eks-komunis, dirampas hak politiknya.*



Bagi saya, negeri manapun atau pada siapapun kita merujuk untuk mencapai cita-cita demokrasi, bukan menjadi problem utama kita. Sebab, bagaimanapun, berangkat dari konteks yang tengah dihadapi, kita harus tetap berjuang untuk demokrasi yang adil. Demokrasi sekarang ini sama sekali belum adil. Seolah-olah *start*-nya sudah sama, padahal sebelumnya, orang lain disuruh “minggir” terlebih dahulu. Maka sudah dapat dipastikan siapa yang akhirnya akan bisa memenangkan perlombaan itu. Bagi saya itu perbuatan yang sangat licik.

*Problem ketidakadilan di Indonesia yang menimpa kalangan minoritas, hampir sudah menjadi sesuatu fenomena yang membudaya dan mengakar lama. Misalnya, karena yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dengan masyarakat yang cukup religius, maka apa yang selama ini diperjuangkan oleh Anda agar masyarakat eks-tapol (tahanan politik) komunis dan keluarganya juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya, bagi kebanyakan masyarakat adalah suatu usaha yang sama sekali tidak bisa diterima.*

Itu problem akut bangsa ini. Makanya kita juga seharusnya tidak usah mengeluh kalau kemudian muncul fundamentalisme. Karena dalam sejarahnya kita telah melakukan represi yang luar biasa terhadap satu golongan tertentu. Masalah ini, menurut saya, tak ubahnya seperti daur hidup. Kalau salah satunya saja dipotong, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Iklim sekarang berubah-ubah secara ekstrem, karena beberapa daur hidupnya telah terpotong. Kita selalu mengeluh kenapa fundamentalisme muncul di Indonesia, sementara tidak pernah mengeluh kenapa yang bersikap kritis tidak boleh muncul juga di Indonesia. Seharusnya semua itu dilihat secara seimbang. Kalau sudah imbang, tinggal bagaimana bersama-sama berjuang dengan cara damai, tidak ada kekerasan.

Sekarang secara umum kita hampir saja menyimpulkan dan menganggap bahwa orang-orang kiri selalu memakai kekerasan dalam perjuangannya. Padahal, sekarang lihat siapakah yang sekarang ini menggunakan kekerasan? Di satu sisi ada kelompok yang menuduh bahwa kelompok “X” telah memakai kekerasan, sementara pada sisi lain kelompok yang menuduh tersebut juga melakukan kekerasan dalam menjalankan tujuannya.

*Terkait peran dan fungsi negara, dengan segala ketidakefektifan penegakan hukum, sebagaimana telah Anda utarakan, lantas bagaimana dan dari mana kita memulai agar negara bisa menjamin, melindungi dan memenuhi semua pilihan yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik serta ekonomi, sosial dan budaya agar tumbuh bersama secara adil dan fair?*

Apabila kita bertanya negara itu siapa? Maka jawabnya: tentunya “kita semua” juga. Negara itu sistem di mana kita juga termasuk di dalamnya. Rakyat adalah bagian dari negara. Kalau berbicara aparaturnya, baru bisa bermacam-macam. Sungguhpun demikian, sebetulnya bagaimanapun corak lembaga-lembaga negara, sangat tergantung pada kita semua. Makanya negara tidak akan pernah final. Kalau menganggap negara sekarang sudah final, itu berbahaya. Karena masih banyak kelompok yang masih belum bisa berbicara.

Seharusnya seluruh elemen masyarakat, baik kelompok adat dan kelompok seperti Kejawan dan sejenisnya di negeri ini, juga mesti ditanya bagaimana menurut

---

Menurut saya, orang Islam belum punya hak untuk mengatakan pluralisme sebelum mengakui secara teologis bahwa ada keselamatan di luar masjid.

---

pandangan mereka cara mengelola negara, sistem sosial, ekonomi dan sebagainya. Banyak hal yang ternyata baru kita ketahui sekarang, karena memang sejak dulu kita semua tidak pernah ditanya dan diajak untuk berpendapat. Yang dianggap mewakili pendapat paling bagus selama ini hanya orang-orang pintar. Padahal itu saja tidak cukup. Kelompok-kelompok orang yang dianggap “bodoh”, orang-orang yang bertapa di gunung-gunung, dukun-dukun, kiai-kiai, orang-orang yang selama ini tidak pernah diajak berbicara pun seharusnya juga ditanya, dimintai pendapat.

*Jika demikian idealnya, apakah bagi Anda sendiri mekanisme pemilu sebagai prasyarat demokrasi prosedural belum mencukupi?*

Tentu saja pemilu belum cukup. Karena pemilu hanya memakai partai politik yang sifatnya masih ada pembedaan mayoritas-minoritas. Di situ masih ada ketentuan-ketentuan yang sama sekali belum memenuhi syarat. Apalagi ada larangan-larangan yang kadangkala sudah dianggap sebagai

kesepakatan yang pasti dan mengikat. Seharusnya, karena negara belum final, kesepakatan pun harus selalu diperbaharui, jangan mandek di satu titik. Karena ternyata sikap seperti itu bisa menimbulkan efek psikologis seperti munculnya fundamentalisme, pemaksaan sebagian ajaran agama menjadi perda, dan lain-lain. Misalnya dalam kasus tertentu, mengapa yang itu boleh jalan, sementara yang lain tidak? Itu terjadi karena para pemegang otoritas yang bersikap tidak adil.

*Masalahnya prosedur yang bisa mempersilakan semua elemen untuk bisa tampil mengeluarkan pendapat dan didengar oleh semua, termasuk institusi negara, hanyalah demokrasi. Sedangkan mekanisme demokrasi yang dipraktikkan adalah sistem perwakilan. Makanya sangat wajar kalau pada akhirnya tidak semuanya bisa tampil. Kalau kita menghendaki bahwa yang ideal adalah dengan juga menanyakan orang-orang yang di pinggirkan, kalangan miskin, tidak terpelajar, yang dirugikan secara materil dan spiritual, tanpa mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin, maka pasti model seperti itu sangat susah. Lantas mekanisme apa yang bisa merangkul semuanya?*

Satu hal yang paling penting adalah “rekonsiliasi” nasional. Kita sebagai suatu bangsa sudah tercabik-cabik betul. Sekarang ini kita seolah-olah jalan bersama meski dengan situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan seperti itu, sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai pada prosedurnya saja. Padahal demokrasi tidak hanya prosedur, tetapi juga substansi. Dulu, kita sudah berbicara banyak bahwa demokrasi prosedural itu tidak cukup. Lantas untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial itu dengan cara apa? Untuk hal ini, kita juga sudah pernah mewacanakan konsensus nasional. Konsensus nasional itu sendiri syaratnya adalah terlebih dahulu tercipta rekonsiliasi bersama yang melibatkan semua pihak. Tidak mungkin tercapai konsensus yang ideal kalau dalam tubuh bangsa ini masih penuh dengan permusuhan.

Dalam konteks tersebut, rekonsiliasi artinya semua elemen yang ada saling mengakui bahwa saya telah bersalah, yang lain juga demikian. Kita semua pernah bersalah, tidak selalu benar, dan itu tidak usah dipermasalahkan lagi. Namun yang terpenting, satu hal yang harus dilakukan sekarang, adalah jangan mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu itu.

Dulu, di satu pihak, negara tidak adil terhadap wilayah-wilayah tertentu, seperti kasus Aceh, Papua, dan sebagainya. Karena itu harus dibuat catatan bersama yang tegas: negara tidak boleh menganaktirikan daerah lagi. Semua kesalahan, dalam proses rekonsiliasi itu, akan diberi catatan. Semua kesalahan dicatat dan tidak boleh diulangi lagi, termasuk trauma-trauma, pemberontakan-pemberontakan yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, politik, daerah, dan sebagainya juga diberikan catatan. Kalau sudah begitu maka kesimpulannya, tentu saja, semuanya pernah melakukan kesalahan. Sehingga yang terpenting, sekarang, sekali lagi, tidak boleh mengulangi kembali kesalahan itu. Setelah itu, mari kita merumuskan kesepakatan-kesepakatan baru, tidak sekadar cuap-cuap soal Pancasila dan UUD '45, tetapi juga diisi dengan semangat-semangat baru yang rekonsiliatif. Konsensus haruslah seperti itu. Kita harus memulai lembaran dari awal, karena banyak hal yang belum terselesaikan. Papua dan Aceh sampai sekarang belum sepenuhnya rela menjadi Indonesia, dan kita tidak bisa menutup-nutupinya.

---

Perintah membuat negara Madinah sendiri tidak terdapat dalam al-Qur'an. Tetapi karena tuntutan sosial politik, Nabi kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat model seperti itu, meski mungkin juga tidak membuatnya secara sengaja. Namun prinsip dari negara Madinah model Nabi itu adalah bahwa pluralitas harus dijaga dan harus ada dasar yang disepakati bersama. Dasar-dasar itulah yang harus diambil dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu dasarnya adalah apakah agama tertentu dijadikan landasan bersama oleh semua orang atau tafsir atas agama tertentu akan dijadikan pedoman bagi semua orang.

---

*Apakah rekonsiliasi sebagai alternatif yang Anda dorong untuk negeri ini agar tercipta tatanan yang ideal dapat begitu saja tercapai, sementara di tengah masyarakat masih terekam nyata trauma mendalam bagi beberapa kelompok yang pernah mengalami konflik? Lantas bagaimana cara yang paling mungkin untuk mengeliminir dan merehabilitasi stigma terhadap kelompok tertentu karena dianggap sebagai sumber trauma bagi sebagian kelompok yang lain?*

Jika persoalannya seolah begitu rumit untuk menciptakan rekonsiliasi nasional, maka kita kalkulasikan saja: siapa yang merasa paling bersih di Indonesia ini. Siapa yang merasa tidak pernah melukai yang lain dan tidak pernah membuat trauma di negeri ini? Ada atau tidak, siapa atau kelompok yang mana, partai politik mana (misalnya, partai politik yang baru mungkin belum melakukan kesalahan, meski juga masih bisa ditanya, karena beberapa orang di dalamnya, barangkali, adalah muka-muka lama yang pernah duduk pada partai politik yang lama)?

Jadi, kita harus sama-sama terbuka untuk mengetahui dan memulai semua itu. Yang harus ditekankan di sini, kalkulasi ini sendiri pun tidak bisa hanya berdasar pada klaim. Orang-orang di Aceh, misalnya, dulu trauma kepada TNI dan Brimob, sekarang orang Pasuruan trauma pada Angkatan Laut, dan banyak trauma-trauma lain yang dulu terlihat tidak menjadi trauma. Menata kembali hal-hal seperti itu penting dilakukan sebagai upaya untuk dapat duduk bersama dan memulai kembali konsensus nasional yang sesungguhnya. Barulah kita bisa memulai demokrasi lagi.

Demokrasi harus memiliki latar historis. Tidak ada demokrasi yang tidak mempunyai akar. Amerika mempunyai demokrasi, karena dia juga mempunyai latar belakang konflik yang luar biasa besar, perang sipil dan rasisme misalnya, untuk kemudian mewujudkan sistem demokrasi. Eropa juga sebelum demokratis, diwarnai dengan konflik berkepanjangan. Dalam urusan mengatasi panjang dan beratnya trauma sebagaimana yang menimpa masyarakat Eropa, negara kita masih kalah jauh.

Satu hal yang perlu dicatat dari sejarah mereka adalah sikap mau mengakui. Meski kenyataannya sekarang juga terlihat mulai muncul lagi sikap-sikap pemicu konflik seperti gerakan dari kelompok kanan yang anti-Yahudi atau Kristen Ortodoks. Tetapi hal seperti itu tidak apa-apa, sebab dari situ mereka akan belajar kembali untuk berdemokrasi, demikian seterusnya. Bagi Indonesia, menurut saya, sudah selayaknya kita harus kembali memperbaharui komitmen berbangsa. Oleh karenanya, semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin harus cepat pula penyelesaiannya, jangan ditunda-tunda, apalagi diwariskan ke generasi selanjutnya.

*Apakah salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang ideal kita mesti melakukan perubahan pada konstitusi dan dasar negara kita?*

Bisa saja hal tersebut dilakukan. Tetapi persyaratannya semua kelompok harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berbicara. Tidak seperti sekarang ini, tiba-tiba DPR membuat Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, seolah-olah yang dilakukan sudah demokratis, ternyata di sebelah sana masih banyak yang bilang tidak sepakat. Artinya, demokrasi sebenarnya belum seutuhnya dijalankan. Perda syariah, misalnya, meski telah melalui demokrasi prosedural dengan digodok terlebih dahulu pada tingkat legislatif sebelum menjadi keputusan eksekutif, tidak menjamin hidup kita sebagai bangsa menjadi lebih baik.

---

Satu hal yang paling penting adalah “rekonsiliasi” nasional. Kita sebagai suatu bangsa sudah tercabik-cabik betul. Sekarang ini kita seolah-olah jalan bersama meski dengan situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan seperti itu, sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai pada prosedurnya saja. Padahal demokrasi tidak hanya prosedur, tetapi juga substansi.

---

Kita harus bertanya secara kritis mengenai hal itu secara terus-menerus. Lebih baik sedikit undang-undang tapi bisa memberi semua orang kebebasan dan rasa aman, daripada banyak undang-undang namun membuat bangsa menjadi terpecah-belah.

*Kita semua menyadari bahwa Indonesia sangat majemuk, ada beragam bahasa, agama, suku, dan lain-lain. Kalau kita tengok sedikit ke belakang, ketika MUI mengharamkan pluralisme dengan alasan bahwa pluralisme cenderung mengarah kepada sinkretisme, penyamaan semua kebenaran agama – di samping oleh beberapa kalangan pluralisme juga dipandang merelatifkan semua kebenaran agama, lantas bagaimana Anda memahami pluralisme?*

Bagaimanapun, sudut pandang yang dipakai oleh MUI dengan kita memang berbeda. MUI masih melihat bahwa Islam itu seperti entitas tunggal yang melingkupi semuanya. Cara pandang ini sendiri, bagi saya, merupakan bakat-bakat totalitarianisme Islam. *Husnuzhzhann*-nya bahwa yang dikritik oleh MUI adalah soal “isme”-nya. Kendati keyakinan terhadap pluralisme,

seperti dalam definisi mereka, tetap tidak boleh ditolerir. Sebab, fatwa tersebut berusaha untuk menciptakan tidak adanya perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan.

Dalam tingkat tertentu, pemahaman kita tentang konsep Indonesia juga sebenarnya masih demikian. Kita bilang bahwa Indonesia itu plural, padahal sebenarnya yang dipikirkan cuma satu.

Semangat totalitarianisme sebenarnya masih tetap ada pada diri bangsa Indonesia. Bagi saya, menganggap realitas sebagai satu, itu tidak bisa. Masalahnya, terkadang kita sendiri tidak konsekuen dengan jargon pluralitas yang kita ketahui. Semangat kita plural, namun pada praktiknya tetap mengakui ketunggalan. Meski semboyannya *Bhinneka tunggal ika*, tetap saja hanya mengakui ketunggalan. MUI menganggap pluralitas itu tidak ada, sementara, di sisi lain, kita mengakui pluralitas namun, dalam praktiknya, sekaligus juga kerap tidak mengakuinya.

*Benar, pandangan monis dalam berbagai aspek kehidupan kerap tidak sadar kita amalkan. Inilah sebab utama yang mudah menyeret masyarakat ke dalam paham-paham dan tindakan yang totaliter, mereduksikan yang majemuk menjadi tunggal. Dalam agama dikenal monoreligius. Sebagai contoh, setiap agama memiliki konsep salvation, keselamatan. Artinya setiap agama memiliki klaim keselamatan dan kebenarannya masing-masing dengan – jika diekstremkan – menganggap yang lain sebagai salah dan sesat. Pendeknya, sulit menghargai keragaman kebenaran dalam beragama. Dalam Islam misalnya, pluralisme diharamkan karena keselamatan hanya ada pada Islam. Pluralisme yang beranggapan bahwa semua agama memiliki kebenarannya masing-masing, menurut kalangan yang menentangnya, hanya akan mengakibatkan lemah atau bahkan tercabutnya iman umat. Bagaimana Anda memahami konsep keselamatan dan apa implikasinya terhadap pluralisme?*

MUI sudah secara jujur berbicara seperti itu. Mungkin, sebenarnya, dalam hati kita juga ingin mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada Islam. Sementara, bedanya dengan Katolik, agama tersebut mengakui bahwa keselamatan terdapat di luar gereja. Menurut saya, orang Islam belum punya hak untuk mengatakan pluralisme sebelum mengakui secara teologis bahwa ada keselamatan di luar masjid. Saya melihat, dalam hal itu MUI benar,

karena memang tuntutan teologisnya masih seperti itu. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa keselamatan itu ada di luar Islam juga, dengan jaminan teologis yang ada dalam al-Quran?

*Kalau terjemahan MUI sudah secara tegas seperti itu, bagaimana tafsir Anda terhadap pluralisme dalam Islam?*

Sepanjang pengetahuan saya terhadap al-Quran, landasan teologis pluralisme memang tidak ada.

*Doktrin al-Quran yang menegaskan bahwa orang yang di luar Islam jika berbuat baik dan beramal saleh maka kebajikannya juga akan dicatat, diberi pahala, dan akan dibalas dengan rahmat yang sama, bagi beberapa orang ayat itu menjadi legitimasi teologis dari pluralisme dalam Islam. Bagaimana menurut Anda sendiri?*

Tetapi, bagaimanapun juga, versi terakhir dari tafsiran ayat itu juga tidak diakui. Artinya MUI telah jujur mengatakan bahwa dalam arti itulah kebenaran yang diyakini Islam, dan sampai sekarang belum ada pihak yang mendeklarasikan bahwa ada keselamatan di luar Islam.

Padahal kalau kita kembali ke ayat-ayat yang lebih awal, sebetulnya Islam itu longgar saja.

Sayang di bagian akhir, dengan

turunnya ayat seperti "*inna al-dīna 'inda Allāhi al-islām*", keyakinan awal itu dianggap selesai semua. Itulah yang dipegang MUI. Saya yakin bahwa banyak pendapat yang berhenti dan diam di situ. Ayat itu sendiri sebenarnya masih banyak diperdebatkan. Perdebatan yang muncul seperti tentang kata islam dalam ayat itu. Apakah islam di situ dalam arti agama dengan huruf "I" besar, atau islam dalam arti bukan lembaga, melainkan perilaku amal saleh sebagai bentuk kepasrahan atau ketundukan terhadap Tuhan,

---

Agama menyediakan banyak jalan dan pilihan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan banyak jalan. Hal seperti ini, menurut saya, menarik. Bahwa pilihan sifatnya eksperimental, itu pasti. Karena dalam Islam, kalau orang berijtihad, salah pun tetap berpahala. Tuhan sangat adil. Itu sangat mendewasakan umat. Dalam konteks itulah saya bersikap terhadap fundamentalisme.

---



*mashlahah*? Bagaimana meletakkan Islam dalam arti luas dan *dien* dalam arti luas juga?

*Jadi harus bagaimana agar orang Islam dapat menghargai dan mengakui pluralitas?*

Saya kira problemnya lebih kepada kebenaran teologis. Dalam Islam dikenal ada yang *jumbûr* (pendapat mayoritas) dan yang *syadzdz* (pendapat minoritas). Kalau Anda mempunyai pendapat bahwa ada kebenaran dan keselamatan di luar Islam, itu bukan pendapat *jumbûr*.

*Apakah gagasan seperti live-in (duduk bersama-sama dengan orang dari agama, kepercayaan, dan adat yang berbeda sehingga bisa saling menyelami kebenaran di luar yang dimiliki agama masing-masing) sebagaimana pernah dipraktikkan sejak Mukti Ali menjabat Menteri Agama (dengan Djohan Effendi sebagai pelaksananya), masih diperlukan untuk saat-saat ini?*

Saya tidak tahu juga urgensi program itu untuk masa sekarang. Soal itu, MUI mempunyai aturan-aturan tertentu. Hal-hal yang bersifat *mu'âmalah* silakan saja untuk bertemu, namun masalah *'ubûdîyah* dan teologis tidak bisa dikompromikan. Yang belum ditegaskan di dalam pemahaman Islam versi MUI adalah kebebasan manusia untuk beragama dan berkeyakinan. Meskipun Islam beranggapan mempunyai keselamatan sendiri, seharusnya Islam membiarkan orang lain menjalankan agama dan keyakinannya mereka masing-masing, seperti halnya kebebasan tersebut kita, umat Islam, miliki. Tidak perlu mendeklarasikan dulu bahwa di luar Islam juga terdapat keselamatan, nanti malah akan runyam, karena ketidaksiapan kita sendiri.

*Tetapi, misalnya, karena dalam Islam ada konsep islamisasi dan di Kristen juga ada kristenisasi, kalau tidak pernah duduk bareng, yang akan muncul antara keduanya selalu rasa saling curiga.*

Problem ini sangat terkait dengan banyak hal. Namun tetap paradoks yang ada di dalamnya sangat banyak. Saya sendiri merasa malu untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Kita bilang bahwa

kita plural, tetapi pada saat yang sama kita juga membiarkan orang Islam melakukan sesuatu yang memalukan. Ternyata yang mendapat dana korupsi itu (dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, DKP), misalnya, orang-orang Islam juga. Artinya kita tidak bisa konsekuen. Sayangnya ada saja kelompok kita (Islam) yang menggunakan model ini tidak untuk refleksi, melainkan politisasi dan pemaksaan kehendak. Inilah yang masih perlu membutuhkan banyak perjuangan.

*Sebagaimana kita mafhum dengan apa yang selama ini Anda tempuh, di luar strategi teologis yang memang sangat susah dicarikan pendasarannya dalam Islam: bagaimanakah strategi menyebarkan nilai-nilai profetis dan emansipatoris agama dalam konteks sosial, di wilayah publik? Langkah apa yang harus dilakukan agar umat beragama dapat saling memahami satu sama lain sehingga bisa saling menerima, duduk bersama dan dapat hidup secara damai?*

Yang paling penting, menurut saya, adalah menjaga kebebasan. Setiap orang mempunyai hak yang sama. Kalau ada seseorang atau kelompok yang mengganggu orang atau kelompok lain, maka kita harus ikut membela pihak yang diganggu itu. Kita harus mencegah munculnya tekanan atau tindak represi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, agar tidak terjadi desktruksi. Itu syarat minimalnya.

Tetapi, kalau kita menginginkan kebebasan yang sebenarnya, maka cara satu-satunya adalah dengan membiarkan orang lain untuk memiliki kebebasan yang sama. Menjaga hal seperti itulah yang masih susah bagi masyarakat kita.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 07 Juni 2007

Percakapan dengan

# Muhammad Tholhah Hasan



**Muhammad Tholhah Hasan**, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid dan pernah dua periode menjadi Rektor Universitas Malang (Unisma). Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia.

---

Jangan biarkan “fikhisme” dan politik ideologi keislaman berkolaborasi. Bagaimanapun, kemestian bagi kalangan *mainstream* (umat Islam) hidup di tengah bangsa yang plural adalah mengedepankan dialog persuasif. Lantaran nilai-nilai substansial Islam telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan kerendahan hati untuk tidak memaksakan nilai-nilai partikular agama masuk dalam legislasi; pun tidak berpikir skripturalis, melainkan substansialis. Karena itu kemaslahatan umum menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan setiap aturan publik: memberdayakan agama; memompa semangat menyejahterakan masyarakat. Sementara, pemerintah berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan.

*Sekularisme di Indonesia seringkali dipersepsi negatif, ia dicurigai meminggirkan peran agama di ruang publik. Bahkan pendapat yang lebih ekstrem mengatakan bahwa sekularisme anti-agama. Anda sendiri bagaimana memaknai sekularisme?*

Menurut saya bangsa kita cenderung mengambil term dari Barat secara tekstual dan memaksakannya diterapkan di tengah masyarakat. Padahal, bisa jadi, itu belum tentu tepat. Contohnya term sekularisme. Sebagai sebuah gagasan, sekularisme sejatinya fenomena sosial yang dinamis dan tidak pernah berhenti di satu titik. Sekularisme yang kini berkembang di berbagai negara, berbeda dengan gagasannya yang pertama kali muncul di Inggris. Sama halnya dengan term demokrasi yang lahir di Prancis. Bagaimanapun demokrasi yang kini berkembang di dunia pun berbeda dengan yang pertama kali muncul di Prancis. Dulu tak terbayangkan akan muncul demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Ini terjadi karena fenomena sosial selalu mengalami dinamika. Celakanya, kita kerap kali memahami fenomena tersebut sama seperti awal munculnya.

Sekularisme merupakan gerakan yang berusaha menghilangkan dominasi gereja terhadap negara. Sebagai istilah, sekularisme pertama kali dimunculkan oleh penulis Inggris George Holyoke pada tahun 1846. Tetapi praktik sekularisme sendiri sudah berlangsung lama ketika masyarakat Eropa gerah dengan kekuasaan gereja yang sangat absolut. Sementara negara (pemerintah) sangat lemah. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gagasan filosofis sekularisme, yaitu agar gereja dipisahkan dari urusan duniawi yang profan – termasuk urusan-urusan politik. Revolusi filsafat tersebut ternyata berhasil. Akhirnya, gereja dipisahkan dari masalah-masalah politik. Gereja hanya diberi wewenang mengurus masalah agama yang menyangkut urusan privat. Sedangkan masalah yang terkait dengan urusan publik, seperti negara, tidak menjadi kewenangan gereja. Negara harus dipisahkan dari gereja. Dalam literatur bahasa Arab, hal itu disebut pemisahan (*al-tafriq*) antara agama (*al-dîn*) dan negara (*al-dawlah*). Masalah sekularisme, lalu menjadi isu menarik selama berabad-abad.

Namun, berbeda dengan gagasan awal di atas, kini negara-negara yang berpaham sekular seperti Amerika Serikat pun ternyata masih mengurus masalah agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski

masyarakat Amerika sekular, nilai-nilai dasarnya tidak dapat dilepaskan dari protestantisme. Sistem pemerintahan sekular ternyata tidak dapat menggusur agama (Protestan) dari masyarakat. Bahkan, tak hanya Protestan, agama-agama lain pun, termasuk Islam, bisa tumbuh di sana. Tak dapat dipungkiri, kekuatan agama sangat mempengaruhi politik Amerika Serikat. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sekularisme tidak dapat memisahkan secara tegas antara agama dan negara. Pada akhirnya, gagasan pemisahan agama dan negara hanyalah wacana.

*Lantas bagaimanakah perkembangan sekularisme di dunia Islam sendiri?*

Kalau kita memperhatikan perdebatan yang terjadi di dunia Islam, kini banyak sekali kajian tentang sekularisme. Sejauh ini, perdebatan tersebut terbelah ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok *al-tawhîd bayn al-dîn wa al-dawlah*. Bagi kelompok ini, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gagasan ini banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Quthb. Di Pakistan, gagasan ini

disampaikan oleh Abul A'la al-Maududi. Sementara di Indonesia, disuarakan oleh banyak kelompok, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

*Kedua*, kelompok *al-tafrîq bayn al-dîn wa al-dawlah*. Kelompok ini menganggap agama (*al-dîn*) sebagai entitas yang harus dipisahkan (*tafrîq*) dari negara (*al-dawlah*). Keislaman sama sekali tidak menyangkut masalah negara atau politik. Islam hanyalah agama. Tokoh yang menyampaikan gagasan tersebut diantaranya Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain.

*Ketiga*, kelompok *al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah*. Kelompok ini mengatakan bahwa urusan agama harus dibedakan (*tamyîz*) dari urusan negara. Meski ada hubungan antara agama dan negara, tapi ada urusan-urusan yang bukan bagian dari agama dan juga bukan bagian dari negara.

---

Sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia. Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

---

Gagasan ini baru belakangan muncul. Para pemikir yang mengemukakannya yaitu Abdul Hamid Mutawalli dan Muhammad Imarah. Kini, tiga kelompok pemikiran tersebut saling berpacu merebut pengaruh. Dalam praktiknya, gagasan kelompok yang terakhir (*al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah*) merupakan yang paling banyak dianut di berbagai negara. Contohnya di Indonesia. Indonesia, dari segi sistem kenegaraannya adalah negara sekular, tapi masyarakatnya Muslim. Negara Indonesia sekular tetapi memiliki Departemen Agama. Fenomena semacam ini dulu tidak pernah terbayangkan. Jika konsisten menerapkan sekularisme, mestinya negara tidak lagi mengurus agama.

*Sejak awal, Indonesia dengan jelas mengatakan dirinya bukan negara agama, meski ia juga tak dapat dianggap sebagai negara sekular. Lantas, kesadaran seperti apakah yang melatarbelakangi dibentuknya Departemen Agama? Untuk kepentingan apa lembaga itu dibentuk?*

Kita harus memahami, tujuan awal didirikannya negara ini tidak terlepas dari kewajiban melayani kepentingan rakyat. Salah satu kepentingan rakyat adalah masalah yang terkait dengan kehidupan beragama. Kalau negara tidak bisa melayani kehidupan beragama rakyatnya, berarti negara tidak bisa melayani bagian-bagian yang dianggap sangat sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, mayoritas pendiri bangsa ini menyatakan, meskipun Indonesia tidak berdasarkan agama, tapi negara harus memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan beragama. Atas dasar itu, disepakatilah Departemen Agama yang secara khusus mengurus masalah-masalah agama.

*Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa hal itu justru akan mengubah Indonesia menjadi negara agama? Sebab, ketika pernah terlontar isu pembubaran Departemen Agama dari Presiden Abdurrahman Wahid, pada waktu itu, justru muncul reaksi balik yang menuntut pemerintah untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Bagaimana menurut Anda?*

Saya kira itu wacana politik yang tidak mengakar kuat di masyarakat. Memang, sejak awal hingga saat ini, ada beberapa kelompok terpelajar yang tidak tertarik dengan Departemen Agama. Bahkan, sejak perumusan

Undang-Undang Dasar 1945, kelompok itu sudah muncul. Mereka tidak menyetujui campur tangan negara dalam urusan agama. Yang mereka inginkan adalah agar Indonesia menerapkan sekularisme secara murni, agama dan negara harus dipisahkan secara tegas. Tapi, kenyataannya, sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Sekularisme yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia (meskipun di Malaysia Islam diakui sebagai agama resmi pemerintah). Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli seperti Manning Nash dalam *Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia* (1991) sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

---

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok seperti hukum perkawinan, haji, dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

*Menurut Anda, mengapa hingga kini masih ada kelompok yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara Islam? Apakah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara ini belum cukup mengakomodir kalangan Islam?*

Saya kira itu terjadi karena mereka menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara. Mereka tidak akan puas kalau negara ini tidak menerapkan legislasi keislaman. Kelompok ini mengartikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara skriptural. Padahal, mestinya Islam tidak ditafsirkan seperti itu saja. Karena nyatanya, nilai-nilai Islam telah terserap dan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mestinya kita tidak berpikir skriptualis. Berpikirlah secara substansialis. Saya kira para *founding fathers* negara ini yang Muslim telah memberikan contoh begitu baik. Sebagaimana dikatakan Andre Feillard,



pemimpin-pemimpin Islam pada awal kemerdekaan lebih memilih memasukkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol formalnya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa mereka sangatlah substansialis.

*Jose Casanova juga menawarkan agar agama, melalui spiritnya, tampil di ruang publik. Persoalannya, di Indonesia, ketika agama tampil di ruang publik, seringkali yang muncul hanyalah aspek formalnya, contohnya perda syariah. Meski diinginkan sebagian masyarakat, perda syariah merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan konstitusi. Apakah Perda yang merugikan tersebut dapat dibatalkan demi konstitusi?*

Menurut saya setiap tindakan umumnya merupakan reaksi dari tindakan sebelumnya. Tindakan yang ekstrem biasanya akan memicu reaksi yang ekstrem pula. Sekularisme merupakan reaksi dari realitas kehidupan politik sebelumnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang ekstrem juga akan mengalami *cooling down*. Sehingga kehidupan bangsa akan menemukan kejernihan-kejernihan baru. Dalam konteks sekularisme, ternyata keberadaan agama di tengah masyarakat tidak mencederai proses konsolidasi menuju negara demokratis. Proses ini berjalan dinamis. Kita akan mencari bentuk-bentuk baru yang lebih ideal. Suatu saat nanti, mungkin masih ada cara-cara baru untuk melakukan pendekatan yang lebih ideal.

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok, seperti hukum perkawinan, haji dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita harus menyadari, tidak semua nilai agama bersifat universal. Sebaliknya, tidak semua nilai-nilai agama bersifat partikular. Setiap agama memiliki nilai-nilai universal dan partikular. Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang partikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah

publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaksakan agar nilai-nilai universal semata yang dipakai, sebab setiap agama memiliki nilai-nilai partikular. Kita tidak mungkin memaksa semua orang untuk *zuhud*, karena konsep *zuhud* berbeda-beda di setiap agama. Tapi, kalau kita mengajak masyarakat bergotong-royong memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), saya kira semua bisa menerimanya.

Reaksinya akan berbeda jika yang dikedepankan adalah nilai-nilai partikular. Contohnya, di bulan Ramadhan ketika umat Islam berpuasa, kita melarang semua orang makan siang. Orang non-Muslim tidak akan sepakat. Karena mereka tidak berpuasa. Kita tidak bisa memaksakan begitu saja. Sebaliknya, agama lain pun tidak bisa memaksakan nilai partikularnya kepada kita. Misalnya, pada waktu Nyepi, umat Hindu memaksa semua orang harus mematikan lampunya. Itu tidak mungkin. Karena ada umat lain. Hal-hal seperti itu, jika tidak ditoleransi akan menyebabkan konflik.

---

Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang partikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama.

---

*Menurut Anda bagaimana seharusnya negara menyikapi munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat, termasuk tuntutan formalisasi syariat Islam?*

Saya kira setiap negara memiliki pertimbangan berbeda dalam menyikapi berbagai tuntutan yang mengemuka di tengah masyarakat. Biasanya, negara cenderung memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada pemeluk agama mayoritas. Demikian juga Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, sudah selayaknya pemerintah memberikan

pelayanan lebih banyak kepada umat Islam dibanding non-Muslim (asas proporsional). Di samping itu, dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat, pemerintah juga akan menimbang risikonya. Pemerintah akan mempertimbangkan, apakah ketika mengakomodir tuntutan tertentu akan menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira pemerintah tidak akan mengakomodir tuntutan formalisasi syariat Islam jika itu justru akan merugikan non-Muslim. Tapi, pemerintah pun tidak akan mengabaikan tuntutan pembubaran Departemen Agama, yang justru akan mengancam stabilitas negara.

Di atas itu semua, yang sesungguhnya lebih penting adalah bagaimana negara dapat bersikap adil kepada semua warga negara yang wajib dilayaninya. Ini yang justru kerap kali dilupakan. Karena dorongan untuk memenuhi rasa keadilan itulah, di daerah berpenduduk mayoritas Muslim, pemerintah akan memberikan pelayanan lebih banyak kepada mereka. Tapi, karena kita tinggal di daerah mayoritas Muslim, kita melihat seolah-olah Islam terlalu dominan dan menekan kelompok lain. Padahal, hal sebaliknya akan kita rasakan kalau kita berada di daerah minoritas Muslim. Kalau kita ke Bali, kita akan merasakan betapa sulitnya mengubur anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap mayoritas selalu menghendaki agar mendapat jatah pelayanan yang lebih besar dibandingkan minoritas.

*Liberalisme juga memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Bahkan MUI secara paket mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, karena dikhawatirkan membuat keimanan umat Islam luntur. Bagaimana Anda menilai fatwa MUI tersebut?*

Menurut saya, itu terjadi karena MUI hanya menggunakan pendekatan fikih yang cenderung formalistik dan hitam-putih. Dengan pendekatan tersebut, saya tidak heran jika hasilnya liberalisme, pluralisme dan sekularisme diharamkan. Kita harus menyadari bahwa mengeluarkan fatwa merupakan bagian dari tugas MUI. Fenomena liberalisme dan sikap tradisionalisme MUI sebenarnya merupakan refleksi dari kondisi pemikiran Islam masa kini. Paling tidak, kini terdapat empat kelompok Islam yang masih eksis di berbagai negara berpenduduk Muslim. *Pertama*, kelompok tradisional. Mereka merupakan kelompok yang terbesar di semua negara Muslim.

Meskipun pengertian tradisional tidak selalu sama di setiap negara, tapi secara umum mereka masih terikat atau dipengaruhi budaya lokal.

*Kedua*, kelompok revivalis. Kelompok ini terdiri dari mereka yang tidak puas dengan model kehidupan Muslim tradisional. Mereka menganggap ajaran Islam yang dipraktikkan kelompok tradisional sudah tidak suci. Mereka ingin membangkitkan kembali Islam seperti pada zaman Rasulullah dengan cara pemurnian. Tapi, praktik pemurnian ini sendiri, alih-alih berujung pada islamisasi malah menjadi arabisasi. Sehingga, terkadang kita sulit memisahkan antara masalah agama dan budaya. Keduanya menjadi tidak jelas. Semuanya harus mengikuti Arab. Hingga pakaian pun harus seperti Arab. Lucunya, anak-anak kecil yang masih sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) pun diharuskan mengenakan jilbab. Padahal, di Arab Saudi sendiri tidak ada anak TK yang memakai jilbab. Gerakan revivalisme juga muncul di berbagai negara Islam dalam bentuk aliran-aliran yang disebut fundamentalisme, wahhabisme dan sebagainya.

*Ketiga*, kelompok modernis. Mereka berpendapat bahwa tidak semua hal harus dikembangkan

berdasarkan teks-teks keagamaan. Bisa juga menggunakan budaya. Mereka menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka berkeyakinan, tidak semua persoalan kehidupan diatur dalam teks-teks keagamaan. Karena itu, kita tidak bisa bersandar hanya pada teks-teks keagamaan semata.

Seiring berjalannya waktu, muncullah kelompok yang *keempat*, yaitu kelompok liberalis. Mereka kerap menggunakan paradigma baru dalam memahami agama. Menurut mereka, beragama yang benar adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang terkini. Lalu, mereka lebih berani menafsirkan idiom-idiom agama sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok inilah yang dipersoalkan MUI. Terkait hal ini, saya pernah berdiskusi dengan Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi.

---

Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

---

*Perkembangan pemikiran liberal di Indonesia, mendapatkan reaksi balik dari kalangan fundamentalis. Reaksi mereka bahkan berlebihan, sehingga memaksa Depag mencekal Nasr Hamid Abu Zayd di Indonesia beberapa waktu lalu. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana Anda menilainya?*

Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Sebenarnya waktu itu Nasr Hamid akan berbicara di seminar bersama saya di Malang. Tapi karena dicekal, dia tidak jadi mengisi seminar itu. Saya kira ini problem umat Islam. Terkadang kita hanya bisa berkumpul dengan orang yang sama dan sejalan. Tapi, kita tidak siap berkumpul dengan orang yang ber-beda. Bukan hanya dengan yang berbeda agama, dengan sesama Muslim pun seringkali tidak bisa. Kita telah kehilangan makna pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula sangat pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama. Menurut Muhammad Imarah dalam buku *Al-Islâm wa al-Ta'addudiyah: al-Ikhtilâf wa al-Tathawwu' fî Ithâr al-Wihdah*, pluralisme merupakan sebuah keniscayaan. Pluralisme merupakan prasyarat untuk dapat hidup eksis berdampingan dengan orang lain pada semua zaman.

Dalam lingkup keluarga kita sudah diajarkan bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak ada anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka dapat hidup berdampingan dalam satu rumah secara harmonis. Kalau masing-masing tidak dapat hidup bersama, keluarga akan hancur. Yang tua harus berani jika suatu ketika harus tidur dengan yang kecil. Dalam kehidupan lain kita juga mesti begitu. Banyak *nash* al-Quran yang menunjukkan bahwa pluralitas merupakan kehendak Tuhan. Hanya saja ada sebagian orang yang mengartikan pluralisme sebagai sinkretisme atau pencampuradukan semua agama. Itulah yang banyak ditolak. Bagi saya sendiri, pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbeda-beda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan, saya kira MUI juga tidak akan keberatan. Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

*MUI dianggap salah dalam mendefinisikan pluralisme. Selain mengartikan pluralisme dengan sinkretisme, MUI juga mengartikan pluralisme dengan*

*relativisme. Padahal makna yang sebenarnya jelas tidak begitu. Bagaimana menurut Anda?*

Menurut saya, kita perlu belajar berhati-hati mencari luasnya pengertian term-term tersebut. Sebab, jika kita tidak mengetahui makna sebenarnya, terkadang mudah menjatuhkan vonis tanpa mengetahui persoalannya.

*Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokratis, apakah tindakan MUI dapat dikatakan melanggar batas kewenangan negara?*

Selama mereka tidak memanasifikasikannya dalam bentuk tindakan anarkis, saya kira masih bisa ditolerir. Tapi, kalau mereka merusak rumah atau hak milik orang lain, maka itu akan menjadi masalah bagi kita bersama. Sebab di dalam Islam sendiri, perbedaan sangatlah dihormati. Hak milik dalam Islam merupakan salah

satu yang harus dihormati. Bukan hanya hak milik umat Islam, hak milik non-Muslim pun harus dihormati. Nabi Muhammad merupakan contoh orang yang sangat menghormati hak milik orang lain. Buktinya, ketika beliau akan hijrah, barang titipan orang-orang Quraisy yang kafir tetap beliau jaga dan dikembalikan melalui Ali bin Abi Thalib.

Kini, persoalannya banyak umat Islam yang tidak menghormati hak milik orang lain. Kalau mereka tidak cocok dengan orang lain dalam suatu masalah, seolah dibolehkan melakukan apa saja. Mungkin, merampok pun akan dilakukan. Kelompok fundamentalis seperti itu sebenarnya telah ada cikal bakalnyanya dari orang-orang Khawarij, yang membolehkan merampas hak orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya. Jadi fenomena kekerasan seperti itu bukanlah masalah yang baru dalam tradisi dan sejarah Islam.

Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Karena itu, mestinya negara menjaga hak-hak setiap warga negara. Ini menyangkut masalah

---

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan.

---

hak-hak pribadi yang harus dilindungi. Saya tidak setuju dengan tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tertentu terhadap Ahmadiyah. Kita memang boleh mengatakan Ahmadiyah sesat, tapi tidak boleh merusak rumah dan masjid mereka. Karena itu sudah berkaitan dengan hak milik yang mempunyai aturannya sendiri.

Kalau MUI mau mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat juga boleh. Tetapi MUI mempunyai tugas selanjutnya, yaitu mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana MUI membentuk tim untuk mendekati mereka agar mau kembali pada 'jalan yang benar'.

*Menurut Anda apa yang yang menyebabkan pemerintah mendiamkan kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah dan komunitas lainnya yang dianggap sesat (crime by omission)?*

Menurut saya alasannya lebih bernuansa politis. Saya sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah. Mestinya, ia bisa menghentikan kekerasan itu. Tapi karena takut kepada *mainstream*, pemerintah pun cenderung diam. Sikap pemerintah dari tahun ke tahun memang selalu politis. Dulu, Islam Jamaah pernah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang, tapi pada saat pemilu mereka ditampung dan diterima dengan baik. Kemudian, belakangan, mereka banyak menimbulkan konflik-konflik kecil di tengah masyarakat. Mereka diberi nama baru LDII. Pada masa pemilu dulu mereka dibina oleh Golkar, karena hak suaranya jelas diperlukan. Nah, saya kira, sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah kini juga muncul lebih dilatari oleh pertimbangan politis.

*Menurut Anda, apa yang menyebabkan MUI menjadi eksklusif? Padahal MUI merupakan representasi dari semua kelompok Islam yang ada di Indonesia?*

Sebenarnya semua organisasi Islam yang ada di Indonesia masuk ke dalam MUI. Tapi, karena kelompok yang keras jumlahnya lebih banyak, dalam Munas pun, suara mereka lebih kuat. Kondisi ini diperparah dengan perwakilan dari NU dan Muhammadiyah yang berasal dari para ulama fikih. Ini mungkin karena sebagian besar ulama di Indonesia itu berasal

dari ulama fikih. Sementara, sebagaimana diketahui, pendekatan fikih cenderung bersifat formalistik. Hal ini bahkan kemudian dikuatkan dengan ulama yang kerap menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ketika “fikihisme” dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

*Selain MUI dan negara yang lemah, permasalahan juga ditambah dengan perundang-undangan yang tidak melindungi kebebasan berkeyakinan. Beberapa UU yang problematis adalah UU No.1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Bagaimana mestinya menyikapi kondisi tersebut?*

Memang kondisi ini sangat memprihatinkan. Sebab, produk-produk UU yang lahir di Indonesia kebanyakan masih merupakan kelanjutan dari masa lalu. Penyempurnaan yang telah dilakukan sifatnya sangat terbatas dan tidak bisa sekaligus. Ke depan, dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan baru untuk menyempurnakannya. Memang, orang bisa

berpikir cerdas, tapi belum tentu bisa berpikir arif. Antara kearifan dan kecerdasan kerap kali tidak bisa berjalan bersama.

Saya sendiri tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran seperti Ahmad Mushadeq. Tetapi, saya juga tidak sepakat dengan cara yang dilakukan untuk membubarkannya yang dilakukan kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri. Yang mestinya dikedepankan adalah sikap dewasa. Sayangnya, orang-orang yang diterjunkan di lapangan bukan orang yang pintar. Mereka adalah kerumunan (*crowded*), orang yang bertindak hanya berdasar faktor-faktor sugestif dan imitatif.

*Harus seperti apakah mengelola keragaman yang ada di Indonesia agar tidak selalu terjadi pertikaian?*

---

Setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Walaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlahah*, sebaiknya ditinjau kembali.

---



Di Indonesia, konflik memang sulit dihindarkan. Jangankan berbeda agama, satu agama tapi berbeda mazhab saja bisa konflik. Tapi, saya kira, kalau mereka semakin terdidik akan berubah. Mereka akan bisa mendamaikan sendiri. Dulu, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sangat tajam. Tapi, karena semakin banyak orang NU dan Muhammadiyah yang tercerahkan, akhirnya mereka bisa hidup berdampingan dengan tentram. Meski mereka berbeda, mereka mengetahui alasan keberbedaan itu. Yang problem adalah ketika orang berbeda, tapi sama-sama tidak mengerti makna perbedaannya.

*Bagaimana seharusnya negara menjembatani kepentingan berbagai kelompok keagamaan, baik yang mainstream maupun yang dianggap menyimpang?*

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan. Kemudian, kelompok yang dianggap menyimpang seperti Ahmadiyah harus dapat mempertanggungjawabkan keyakinannya. Ia harus siap menghadapi umat Islam yang menganggap tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sebab, yang dipersoalkan umat Islam mayoritas adalah pengakuan mereka akan adanya Nabi setelah Muhammad. Bagi kelompok Islam mayoritas ini, keyakinan Ahmadiyah sudah berbeda dengan pokok ajaran di dalam Islam sendiri, sehingga mereka tidak berhak mengatasnamakan Islam. Kalau mereka sudah tidak mengaku dirinya sebagai Muslim, maka umat Islam akan diam. Selanjutnya, tinggal urusan antara pemerintah dengan Ahmadiyah.

Tapi kalau mereka tetap mengaku Muslim, padahal yang dilakukan sudah bertentangan dengan Islam, tugas kita adalah meluruskannya. Kalau mereka tidak mau diluruskan, jangan mengaku sebagai Muslim. Sebab, Islam memiliki patokan-patokan yang secara universal diakui. Hal ini sendiri sebenarnya berlaku bukan hanya di dalam Islam. Seandainya saya seorang umat Kristen, kemudian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen mayoritas pun tidak bisa menerima. Saya pernah punya pengalaman mendamaikan kelompok yang dianggap sebagai sempalan dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah. Di sana ada aliran yang mengaku sebagai Hindu Kaharingan. Tapi orang Hindu tidak bisa merima

mereka. Saya kemudian mengambil inisiatif untuk mendamaikan mereka. Kedua kelompok saya kumpulkan untuk mendialogkan masalah yang dipertentangkan. Pemerintah tidak mencampuri masalah, tapi hanya memfasilitasi supaya mereka berdialog. Ternyata, dengan jalan itu, mereka kemudian bisa berdamai. Masing-masing mengakui mana yang perlu dan tidak perlu diperdebatkan. Kaharingan pun kemudian diakui sebagai salah satu sekte dalam agama Hindu. Walau belakangan konflik itu kembali terjadi, menurut saya, lebih karena adanya kepentingan dan muatan politik.

---

Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

---

*Bagaimana mestinya menempatkan fatwa MUI? Sebab, dalam beberapa kasus, melihat fatwa MUI sulit dipisahkan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya, fatwa yang mengharamkan bunga bank. Fatwa ini kemudian malah menjadi jalan munculnya Bank Syariah. Dari sini, mereka menuai keuntungan dengan menjadi Dewan Syariah di sejumlah bank.*

Menurut saya, MUI tidak menggunakan agama untuk kepentingan ekonomi. Hanya, terkadang kita melihat masalah agama, terutama yang menyangkut wilayah sosial budaya, secara tidak utuh. Di satu sisi yang kita lihat ekornya belaka, sementara di sisi lain yang terlihat perutnya. Padahal, masalah-masalah yang menyangkut muamalah sendiri berkembang sangat dinamis. Sama halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dinamika semacam itu dalam fikih pun sangat dimungkinkan. Contohnya adalah ibadah haji. Dulu melempar *jumrah* pada saat haji harus dilakukan sesudah Zuhur. Sebab tidak ada dalil yang membolehkan dilakukan sebelum Zuhur. Tapi, mazhab Syafii malah telah lama membolehkannya, jika ada alasan darurat. Belakangan, dunia sudah melihat persoalan ini sebagai masalah darurat karena jumlah jamaah haji semakin banyak. Kalau melempar jumrah hanya diperbolehkan setelah salat Zuhur, kepadatan tak bisa dikendalikan lagi dan akan banyak terjadi kemungkinan-

kemungkinan yang membahayakan. Dalam fikih, darurat dapat mengubah sebuah hukum. Maka, diperbolehkan melempar jumrah sebelum Zuhur.

Bank Syariah memang produk baru dari ijtihad fikih. Sebelumnya tidak ada. Bagi saya, masalah Bank Syariah harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, kini bank telah menjadi alat transaksi paling efektif bagi semua orang. Persoalan yang muncul dalam pengharaman bank adalah praktik *ribâ*-nya, yang terkait dengan masalah akad dan lainnya. Menurut saya, Bank Syariah berusaha menyesuaikan atau mendekatkan sistem bank konvensional dengan fikih. Dalam fikih, bisa saja yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Sebab di dalam kaidah *ushûl al-fiqh*, hukum fikih bisa berkembang dan berubah sesuai dengan alasan (*'illah*)-nya. Kalau alasannya ada, boleh berubah. Tapi, kalau alasan itu sudah tidak ada, menjadi tidak boleh. Contohnya, memakan daging babi hukum sebenarnya adalah haram. Tapi, bagi orang yang kapalnya pecah di tengah lautan, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali makanan kaleng yang berisi daging babi dan kalau tidak memakan itu bisa menyebabkan kematian, maka dia boleh memakan daging babi itu. Dia diperbolehkan makan sebanyak yang bisa mempertahankan hidupnya. Kalau nanti dia bisa selamat, dia tidak boleh lagi memakan daging babi.

Karena hukum selalu berkembang, saya kira wajar jika sekarang muncul adanya lembaga yang mengurus wakaf. Saya sendiri sekarang dipercaya sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia. Perkembangan hukum menghasilkan produk baru wakaf. Sekarang telah ada jenis wakaf yang berbentuk uang. Kalau masalah ini kita sandarkan pada fikih klasik, sebenarnya tidak ada satu mazhab pun yang membicarakannya. Karena sistem moneter pada zaman ketika kitab-kitab itu ditulis, belum mengenal sistem keuangan seperti sekarang. Dulu, uang hanya bisa dipakai untuk membayar barang. Tapi sekarang uang bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Bisa menjadi saham, sehingga nilai uang bisa dipertahankan meskipun uangnya sudah tidak ada di tangan, yang ada di tangan hanyalah kertas. Inilah yang saya sebut perubahan sistem moneter. Dalam konteks itulah, wakaf uang bisa dimungkinkan dengan memberikan suatu saham, yang dapat disamakan dengan mewakafkan barang yang bisa dilihat, seperti gedung. Kenapa bisa? Karena nilai saham tersebut bisa digunakan untuk membeli gedung.

Karena alasan itulah, hampir semua ulama fikih dari berbagai mazhab pada abad ke-20 membolehkan wakaf uang. Indonesia termasuk negara

yang baru belakangan membolehkannya. Yang paling cepat merespon ini adalah mereka yang bermazhab Hanafi. Karena Islam mayoritas bermazhab Syafii, maka mazhab Syafii dan Hambali yang paling lambat. Baru sekarang, melalui Badan Wakaf Indonesia, kami ditugaskan untuk mewujudkan wakaf produktif dan wakaf uang.

*Dalam konteks kebebasan beragama, hak-hak dan kebebasan sipil (civil rights dan civil liberties) merupakan hak yang paling banyak dicerai ketika negara menerapkan aturan berbasis syariah. Bagaimana Anda menilai perda syariat Islam, apakah ia bisa sah menjadi sumber hukum di Indonesia?*

Saya prihatin dengan gerakan yang berusaha menjadikan syariah sebagai hukum formal, sementara tidak mengetahui persoalan sesungguhnya. Kita tidak bisa menyamakan semua daerah karena masing-masing berbeda. Kalau di Aceh silakan saja. Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena baik masyarakat maupun pemerintahnya menghendaki begitu. Meski ada yang tidak menghendaki, tapi kita tidak bisa serta merta melarang mereka melakukannya.

Permasalahannya, bagaimana agar penerapan keputusan tersebut tidak merugikan banyak pihak.

Kasus penerapan perda syariah di Tangerang, di mana telah terjadi kasus salah tangkap terhadap seorang guru yang dicurigai sebagai PSK, menurut saya tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang diberlakukannya peraturan tersebut. Kasus tersebut terjadi lebih karena masalah teknis dari aparatnya.

Di atas itu semua, setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Kalaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlahah*, sebaiknya ditinjau kembali.

---

Ahli-ahli fikih siyasah, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan *khilâfah* janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

---

*Penerapan perda syariah diklaim sebagai manifestasi demokrasi di tingkat lokal. Tapi, dalam konteks otonomi daerah, sebenarnya urusan agama tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah, melainkan otoritas pusat. Bagaimana penilaian Anda?*

Kalau mereka sudah melalui kesepakatan masyarakat, DPRD dan pemerintah, sebagai warga yang menghargai demokrasi, dengan sendirinya saya harus menghargai perda syariah tersebut. Kalaupun kita mengatakan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat, mereka pun bisa berdalih bahwa perda syariah tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat.

*Kalau syariat Islam ditegakkan, apakah hukuman-hukumannya juga harus seperti hukuman dulu ketika syariah secara simbolik diterapkan pada masa dinasti Islam, seperti potong tangan dan rajam?*

Saya kira itu masih membutuhkan kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut. Tergantung pada apakah kita berpaham skripturalis ataukah substansialis. Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

*Apa yang membuat kita harus menerima syariat Islam?*

Menurut saya, prinsipnya, adalah bahwa hukuman terhadap suatu kesalahan harus ada. Tujuan hukuman adalah agar orang yang dihukum merasa jera atau, pada tingkat yang paling bagus, tidak bisa lagi melakukannya. Untuk itu, apakah ada cara lain yang bisa dijadikan hukuman agar orang jera? Kalau ada yang lebih efektif, maka pakailah yang lebih efektif.

*Kritik yang kerap muncul terhadap perda syariah adalah lingkungannya yang hanya berurusan dengan hal-hal parsial, kewajiban jilbab, perzinahan dan sebagainya. Sementara kasus yang merugikan negara, yang efeknya lebih besar, seperti korupsi tidak dapat ditangani? Apa pendapat Anda?*

Itu membutuhkan pemikiran baru yang lebih arif. Bukan hanya berdasarkan kecerdasan tetapi juga kearifan. Contoh, Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi. Pada saat itu, Nabi sudah memegang kekuasaan. Tapi, Nabi masih mempertimbangkan bagaimana komunitas Yahudi dan lainnya, untuk bisa hidup dalam satu peraturan yang dibuat oleh Nabi. Di situ, bukan *nash* al-Quran yang dipakai Nabi, melainkan kebijakan dan kearifan.

*Kembali ke konteks otonomi daerah, apakah pemerintah pusat tidak mempunyai hak, berdasarkan konstitusi, untuk membatasi atau bahkan melarang perda syariah?*

Sebenarnya pemerintah pusat mempunyai hak untuk membatalkannya. Jika ada perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau menimbulkan kekacauan dan pemberontakan, maka pemerintah pusat mempunyai hak untuk menunda atau membatalkannya.

---

Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak.

Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

---

*Demokrasi, oleh sebagian kalangan, diyakini akan muncul pada negara yang cenderung sekular. Bagaimana Anda menilai ide khilâfah yang didesakkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau, dulu, Partai Keadilan (PK)?*

Saya hanya melihatnya sepintas. Sekarang perubahan dari PK menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sendiri telah terdapat perkembangan baru. Dewan Pimpinan Pusat PKS mengatakan bahwa PKS sekarang telah menerima pluralisme. Itu menunjukkan bahwa semua isu yang diangkat partai politik lebih bersifat politis, termasuk isu *khilâfah*. Kenapa PKS tiba-tiba bisa menerima pluralisme secepat ini. Padahal, selama lima tahun lebih, mereka seolah terlarang membicarakan pluralisme. Itu menunjukkan bahwa semuanya merupakan masalah yang dianggap sebagai isu dan kepentingan politik, bukan berdasarkan agama. Politik adalah seni untuk melakukan hal yang mungkin.

*Menurut Anda apakah khilâfah kontekstual untuk menyelesaikan problem yang dihadapi sekarang?*

Saya kira masalah *khilâfah* merupakan wacana politik. Sejak awal, Nabi Muhammad telah mengingatkan bahwa khilâfah tidak akan berjalan langgeng. Suatu saat pasti akan mengalami perubahan. *Khilâfah* bersifat temporal. Bukan sesuatu yang universal, yang berlaku selamanya. Lihatlah, empat khalifah dari Abu Bakar, Umar, Usman, hingga Ali, masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pemilihannya pun berbeda-beda. Apalagi masa-masa setelah empat khalifah awal ini. Zaman Muawiyah sudah sama sekali berbeda, hampir tak terlihat lagi sisa praktik khilâfah pada masa-masa awal. Yang tersisa hanya fungsi kepala negaranya saja, yaitu untuk mengatur kehidupan rakyat dan bertanggung jawab demi keselamatan agama. Itulah arti dan praktik *khilâfah* yang masih didengarkan hingga zaman Ibn Khaldun.

*Artinya, kelompok yang tetap mengusung khilâfah sama saja kembali ke peradaban yang lebih terbelakang?*

Ya. Sebab yang mereka perjuangkan hanya bentuknya, bukan semangatnya. Saya menyayangkan para pegiat *khilâfah* di Indonesia yang tidak banyak membaca referensi buku soal khilâfah. Di Indonesia, banyak orang yang mempunyai semangat politik tinggi, tetapi malas membaca kajian-kajian politik Islam.

Ahli-ahli fikih *siyâsah*, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan khilâfah janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

Di Indonesia, yang diusung Hizbu Tahrir (HT) justru bentuk permanen dari *khilâfah*. Karena itu, HT ini tidak diperbolehkan berkembang di negara-negara lain. Di negara kelahirannya sendiri, Yordania, HT tidak diijinkan.

Saya kira *khilâfah* itu hanya wacana semata, tidak akan terwujud. HTI hanya mengusung wacana *khilâfah* karena tidak setuju dengan konsep

negara-bangsa, juga Pancasila. *Khilâfah* yang diusungnya sendiri tidak akan pernah terwujud.

*Bagaimana Anda melihat gerakan Islam transnasional seperti HT dan Jamaah Islamiyah yang memperjuangkan isu khilâfah. Apakah tawarannya akan bisa jadi solusi persoalan bangsa? Kalau tidak, menurut Anda, bagaimana meluruskan pemahaman seperti itu?*

Islam transnasional sebetulnya merupakan gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah dan lain-lain. Kebetulan mereka memperoleh momentum untuk tampil di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memang memberikan peluang bagi mereka untuk tampil. Namun, isu yang mereka angkat, seperti *khilâfah* dan pemberlakuan syariah, merupakan isu yang sudah cukup lama. Di dunia Islam, isu itu sudah usang. Mereka terbelah dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengkaji ulang dengan cara yang lebih rasional, seperti Yusuf Qardlawi. *Kedua*, kelompok yang tidak bisa merebut kekuasaan dan melampiaskannya dalam bentuk gerakan kekerasan.

---

Ketika “fikihisme” dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

---

*Bagaimana pengalaman Anda ketika menjadi Menteri Agama dalam menyusun kebijakan yang mengatur umat beragama di Indonesia?*

Sejak dipilih menjadi Menteri Agama, saya menyatakan Departemen Agama harus mampu mereposisi diri dari menguasai umat menjadi melayani umat.

*Ada yang menilai, pluralisme beragama di Indonesia masih terus mendapat rongrongan karena Departemen Agama sebagai institusi negara yang menaungi semua umat beragama tidak tegas dan adil. Celakanya lagi MUI malah mengeluarkan fatwa yang memancing tindak kekerasan?*



Sejak awal saya sudah meminta agar MUI tidak dijadikan sebagai kepanjangan kebijakan Departemen Agama. Pada waktu itu, saya juga mengatakan agar MUI tidak menjadi *fotocopy* dari kebijakan Departemen Agama. Demikian juga Departemen Agama jangan menjadi payung dari kegiatan MUI, dalam segala sikapnya yang sering mencitrakan ekstremitas pemikiran.

Sebenarnya, MUI merupakan lembaga swasta yang tidak mempunyai kekuatan politik. MUI merupakan federasi dari berbagai macam ormas Islam yang ada di Indonesia. Tetapi, ormas Islam sendiri tidak semuanya sepaham dengan sikap MUI. Contohnya, keputusan hukum dari majelis-majelis yang ada di NU dan Muhammadiyah, yang tidak selalu identik dengan MUI.

MUI sekarang tampak begitu kuat sebenarnya karena perlakuan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Masyarakat yang mengkonstruksi MUI sehingga seolah-olah memiliki otoritas sangat kuat dalam menentukan *bulat-lonjongnya* kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai federasi, kini, MUI merupakan satu-satunya federasi yang mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam ormas Islam. Yang harus dipahami adalah bahwa pengurus MUI itu jelas bukan representasi dari ormas-ormas Islam tersebut. Mereka tidak dicalonkan oleh masing-masing ormas, melainkan dipilih oleh tim formatur dalam Musyawarah Nasional (Munas).

Dari segi pendanaan, MUI sama dengan ormas-ormas lainnya. Sebagian saja dana yang diperolehnya berasal dari bantuan pemerintah. Ketika saya menjadi Menteri Agama, saya pernah memberikan bantuan agar dapat dijadikan dana abadi bagi MUI, sehingga ia tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah terus-menerus.

*Bagaimana Anda merespon fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme?*

Ketika MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman MUI, “*mbok* diadakan kajian yang lebih mendalam, dengan referensi yang cukup memadai dulu, masalah-masalah yang diputuskan tadi ada alasannya atau tidak, pemahamannya benar atau tidak, jangan-jangan nanti akan menimbulkan masalah.” Sayangnya keputusan itu *keburu* dibuat oleh MUI. Baru kemudian, sebelum penyetakan hasil keputusan,

penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari MUI diberikan – seperti penjelasan tentang pluralisme, bahwa yang tidak disetujui adalah yang mencampuradukan agama. MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

Yang menurut saya fatal adalah soal sekularisme. Mengharamkan hal ini, bagi saya, tidak dapat diputuskan begitu saja. Karena, perdebatan seputar kemunculan dan perkembangan sekularisme sendiri sangatlah panjang. Di Indonesia, dulu seperti kita ketahui, pernah terjadi perdebatan antara Cak Nur dan Pak Rasyidi. Sebuah polemik yang sama sekali tidak dangkal dan berjalan tidak sebentar. Karena itu, perlu kajian lebih mendalam sebelum memutuskan haram atau tidaknya sekularisme.

Yang dikhawatirkan oleh Pak Rasyidi berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh MUI dalam konteks sekularisme ini. Pak Rasyidi hanya melihat sekularisme dari latar be-

lakang kemunculannya. Sekularisme yang kemudian berkembang menjadi sikap dan doktrin beraneka ragam, dimaknai Pak Rasyidi sebagai pemisahan permasalahan umat atau negara (masalah profan) dari masalah-masalah keagamaan (masalah sakral). Saya sendiri memahami sekula-

risme sebagaimana yang berkembang di sebagian negara-negara Islam, seperti Maroko, Yordan dan Indonesia, bahwa ia adalah bukan pemisahan, melainkan pembedaan antara mana yang menjadi urusan agama dan mana yang menjadi urusan negara. Bagi saya, pengertian demikian telah menempatkan secara jernih permasalahan yang menjadi tugas negara dan tidak menjadi tugas agama, atau sebaliknya.

---

MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

---

*Bagaimana Anda merespon munculnya berbagai aliran keagamaan baru seperti Mushadeq dan Usman Roy?*

Meski saya tidak setuju dengan mereka, saya kira itu merupakan bukti kegagalan dakwah Islam. Soal Usman Roy di Malang, saya juga tidak

setuju dengan apa yang dilakukan olehnya dan kelompoknya. Tetapi, saya juga tidak setuju dan prihatin bila umat Islam yang telah melakukan salat selama bertahun-tahun tidak memahami arti dari bacaan salat yang dibacanya.

*Dalam kondisi keberagamaan yang jauh dari semangat toleransi seperti sekarang ini, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia?*

Menurut saya, hal itu tergantung dari pergulatan dan pergumulan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Tapi sejauh ini, menurut saya, masyarakat Indonesia masih mendukung pluralisme. Ke depan, kalau kelompok yang antipluralisme didukung oleh pemerintah, misalnya, untuk kepentingan politik tertentu, maka kondisinya mungkin akan sangat berbeda. Tapi saya yakin, selama model pemikiran Islam seperti Muhammadiyah, NU dan Al-Washliyah masih bertahan dan didukung pemerintah, pluralisme masih bisa berkembang dengan cara yang lebih baik.

Meski demikian, di tengah era pemilihan kepala daerah secara langsung, kita harus mewaspadaai usaha kelompok antipluralisme yang sangat vokal ini. Jika mereka berkolaborasi dengan kelompok kepentingan tertentu untuk memenangkan Pilkada, saya khawatir kondisi pluralisme yang telah terjaga akan berganti menjadi antipluralisme.

*Bagaimana menjaga pluralisme secara praksis, apakah hanya sekedar mengakui keragaman atau juga mesti ada keterlibatan seperti advokasi terhadap kelompok minoritas?*

Memang harus ada keterlibatan dari semua pihak untuk menjaga pluralisme. Saya punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh. Sewaktu muda, saya hidup di Malang. Masyarakat Malang adalah masyarakat yang sangat pluralis. Di sana, bangunan masjid dan gereja tak sedikit berdiri berdampingan. Tapi mereka bisa hidup harmonis. Kami saling menjaga dialog sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jika mereka mengundang dalam dialog dan seminar-seminar, kami dari kelompok Islam pun datang, demikian juga sebaliknya. Dengan cara seperti itu, kami dapat menghindari terjadinya benturan-benturan seperti yang terjadi di daerah lain.

Saya kira untuk menjaga pluralisme, kita juga perlu mengedepankan dialog di antara elite-elite keagamaan. Karena masyarakat kita masih sangat paternalistik, jika elite-elitenya dapat hidup secara harmonis, masyarakat pun sangat mungkin akan harmonis. Sebaliknya, kalau elite-elitenya justru saling berkonflik, masyarakat pun akan ikut berkonflik. Karena itu, dialog antaragama masih sangat relevan digalang untuk menjaga pluralisme. Lebih dari itu, nilai-nilai pluralisme pun harus mulai ditanamkan sejak pendidikan awal.

*Kalau sampai sekarang masih kerap terjadi penodaan terhadap pluralisme di Indonesia, menurut Anda, sebenarnya apa yang salah dengan pendidikan kita saat ini?*

Menurut saya pendidikan kita terlalu dikotak-kotakkan. Ada pendidikan Islam, Kristen dan sebagainya. Mereka dididik hanya memahami satu agama saja, tidak dididik untuk memahami prinsip-prinsip agama lain. Tak aneh kalau kemudian tidak ada saling pemahaman di antara mereka. Akibatnya, kita sangat mudah saling tuding, bahkan saling tonjok ketika terjadi kesalahpahaman. Mestinya sejak masih usia anak-anak, masyarakat kita diajarkan untuk saling memahami dan toleran dengan umat agama lain. Pergaulan mereka jangan dibatasi hanya dengan anak yang seagama. Sebab, jika mereka ber-gaul dengan anak dari agama lain, mereka akan belajar untuk saling memahami.

Saya punya seorang cucu yang masih kecil. Dalam pergaulan sehari-hari dia kerap berteman baik dengan anak Katolik. Ketika mereka bermain di rumah saya, saya melihat dialog yang terbangun di antara mereka sangat cair dan enak. Ketika hari Minggu, cucu saya bilang sama temannya yang Katolik, “Ini hari Minggu, kamu tidak pergi ke gereja untuk kebaktian?” Sebaliknya kalau hari Jumat, teman yang Katolik mengingatkan cucu saya untuk salat Jumat. “Ini hari Jumat, aku pulang dulu, kamu kan mau pergi ke masjid untuk salat Jumat”, kata teman cucu saya itu.

---

Pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbedabeda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan saya kira MUI juga tidak akan keberatan.

Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

---

Demikian harmonisnye dialog di antara mereka, meski itu dialog kecil. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah sudah terbangunnya rasa saling mengerti di antara mereka, meski memiliki perbedaan agama. Meskipun masing-masing mempunyai kegiatan keagamaan yang berbeda, mereka bisa menerima perbedaan itu. Dan mereka bisa saling menghargai. Saya kira yang membentuk situasi di antara mereka ini adalah lingkungan.

Contoh lain saya dapatkan dari anak-anak saya sendiri. Mereka dapat bergaul dengan teman-temannya yang non-Muslim, tanpa mengurangi keimanan dan ketaatan mereka terhadap agama Islam. Sikap dan keyakinan anak-anak saya itu, menurut saya, terbentuk dari perjalanan hidup saya dan keluarga sendiri. Dulu, waktu saya masih aktif berbisnis, mereka kerap melihat saya berbisnis dengan orang-orang Cina yang non-Muslim. Saya berbisnis dengan mereka tanpa menyebabkan keimanan saya luntur. Karena itu, faktor teladan juga sangat penting untuk menyemaikan pluralisme di keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, saya kira penting agar para pemimpin dapat menempatkan diri sebagai teladan masyarakat, bukan malah membuat keributan di mana-mana. Saya sangat prihatin dengan pemimpin agama yang mencontohkan tindakan yang tidak baik. Memakai sorban dan peci sambil meneriakkan *Allâhu Akbar*, tetapi yang mereka lakukan adalah penghancuran rumah dan hak milik serta tempat-tempat ibadah agama atau aliran agama lain.

Wawancara dilakukan di Kota Wisata, Rabu, 26 Maret 2008



Percakapan dengan

Nasaruddin Umar



**Nasaruddin Umar**, Guru Besar bidang Ilmu Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekarang ia menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama.

---

Dengan struktur bangsa yang konfiguratif, Bhinneka Tunggal Ika, dan *prototype* masyarakat Indonesia yang berbentuk *ummah*, penerapan demokrasi merupakan keniscayaan. Sebaliknya *khilâfah islâmiyah* tidak lain gagasan utopis. Karena itu, peran yang harus dimainkan agama (*al-dîn*) untuk menggerakkan negara (*al-dawlah*) atau domain publik semestinya bersifat implisit, digali dari prinsip-prinsip moral substansial, bukan formal. Untuk itu sebagai umat hendaknya kita melakukan jihad yang visinya harus paralel dengan ijtihad, yang masuk akal dan nalar. Sedangkan *al-dawlah*, yang moral politiknya diinspirasi dari agama, mengambil peran melindungi agama-agama yang ada; jangan sampai mengambil bentuk negara Machiavellian, karena Indonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan HAM internasional.



*Orang sering memaknai sekularisme sebagai paham peminggiran terhadap peran agama. Bagaimana menurut Anda?*

Menurut saya, pemahaman tentang sekularisme makin lama semakin kabur. Terkadang orang memahami sekularisme dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran, Hadits, *ushûl al-fiqh*, *‘ulûm al-Qur’ân*, atau mengutip pendapat para ulama salaf. Apakah ini upaya melegitimasi paham sekularisme dengan berdasarkan ayat, Hadits, *qawl* (pendapat) ulama, atau memang upaya yang sudah tidak murni lagi sebagai pemahaman sekularisme?

Bagaimanapun, sekularisme dalam konteks kekinian semakin kabur. Kita tidak menemukan “sosok” sekularisme yang orisinal. Di Barat sendiri makna sekularisme juga kabur. Negara mana yang bisa kita contoh sebagai negara sekular? Di Amerika, sekarang, kalau kita lihat pertentangan antara Partai Demokrat dan Republik, keduanya adalah partai yang memiliki dukungan kuat dari kalangan agama. Partai Republik didukung oleh kelompok fundamental Kristen. Begitupun Partai Demokrat, calon presidennya seperti Hillary Clinton dan Barack Obama, keduanya orang yang beragama dan *statement-statement* mereka banyak merujuk pada agama.

Menurut hemat saya, dalam konteks kekinian, yang lazim dikenal dengan zaman posmodernisme, mendefinisikan sesuatu adalah upaya yang cenderung dinilai sia-sia. Boleh jadi upaya kita mendeskripsikan sesuatu terjebak pada hal-hal yang tidak perlu lagi dideskripsikan. Jangan-jangan kita melakukan klaim-klaim yang tidak perlu lagi. Maka, jangan kita memaksakan upaya tersebut, karena dikhawatirkan justru akan menjadi alat pengebak terhadap orang lain. Karena bermula dari suatu definisi dan klaim, maka setiap orang atau kelompok yang berbeda dan sekular begitu saja dianggap sesat, dilihat dari segi praktik keagamaan, meskipun ia mampu memberikan kontribusi sosial yang cukup baik. Misalnya, tidak sedikit masjid dan fasilitas pendidikan yang dibangun oleh orang yang dituduh sebagai sekular dan sesat. Dilihat dari segi politik, dia banyak menggolkan regulasi yang lebih berpihak pada Islam. Dilihat dari segi pertahanan, mereka ini yang lebih solid untuk menjaga umat.

Sementara itu, mereka yang menganggap bahwa sekularisme sesat, ternyata secara formal tidak melakukan apa-apa, tidak membangun rumah ibadah dan kontribusi sosial lainnya. Saya teringat Pak Jusuf Kalla (JK). Orang menilai dia seperti ini dan itu. Pak JK malah balik bertanya: sudah

berapa banyak masjid yang Anda bangun? Dan orang yang bertanya itu berusaha memojok-mojokkan JK. Padahal kita semua tahu sudah berapa banyak masjid dan pesantren yang dia bangun, dan dia banyak menghajikan orang.

Jangan menuduh orang dengan label sekular dan tidak sekular, sementara kita tidak berbuat apa-apa untuk umat. Boleh jadi seseorang yang kita anggap sekular dan sesat, ternyata dia lebih banyak amalannya.

Saya menanggapi wacana sekularisme dengan hati-hati. Karena kita tidak lagi hidup di abad ke-19, di mana ada perbedaan antara yang pro dan kontra terhadap agama. Di era posmodernisme saat ini, paham tersebut sudah kabur maknanya.

Kita tidak bisa menjadikan sekularisme sebagai obyek yang harus dipukul dengan aksi jihad, atau kita sebenarnya tidak bisa lagi membedakan bahwa jihad sekarang lebih dekat dengan al-Quran atau malah dekat dengan Marxisme, dan lain sebagainya.

Kita tahu teori Marxisme telah hancur seiring dengan robohnya Tembok Berlin dan hancurnya Uni Soviet. Rumah Marxisme kini telah hancur. Sekarang ada kecenderungan membangun rumah baru. Pertanyaannya: apakah makna jihad itu lebih dekat dengan ideologi Marxisme atau al-Quran?

Marxisme mempunyai tujuan untuk menghancurkan perbedaan kelas-kelas sosial, menghilangkan kesenjangan kelas proletar dan borjuis. Jihad sekarang berusaha ingin menghancurkan dominasi kapitalisme, persis dengan apa yang dilakukan oleh Marxisme. Bedanya dengan jihad, Marxisme bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jihad tidak boleh seperti itu. Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan

---

Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan orang, untuk menyelamatkan orang.

---

untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan (melindungi) orang, untuk menyelamatkan orang. Sedangkan Marxisme berbeda, siapapun yang mati dan berapapun yang menjadi korban tidak jadi masalah, karena itu merupakan akibat dari revolusi. Dalam Marxisme dikenal revolusi. Kalau ada korban, itu merupakan konsekuensi dari revolusi.

Dalam konsep jihad Nabi ada yang dikenal dengan istilah hijrah: *wa hâjarû wa jâhadû*, sepanjang masih bisa hijrah, jangan jihad. Nabi bukan pengecut ketika harus pindah ke Madinah.

Jadi menurut saya, jangan gegabah menggunakan istilah jihad. Jangan sampai kita bermain dengan gendang yang ditabuh oleh orang lain. Sekarang jihad dipakai untuk membentur kapitalisme dan membantai sekularisme, dan melenyapkan liberalisme. Padahal, dalam Marxisme yang dibenturkan adalah kesenjangan kelas. Jangan-jangan jihad dipakai untuk melindungi ideologi dan metodologi Marxisme.

Tokoh sebelum Marx, yakni Hegel, berusaha membuat tesis dan antitesis dari sebuah masyarakat sosialis. Jadi, menciptakan antitesis itu harus ada risikonya. Konsepnya adalah tesis-antitesis-sintesis. Itu rumusan Hegelian. Dia adalah guru Marxisme. Marxisme memiliki dendam pada masyarakat kapitalis, maka dari itu dia ingin menciptakan masyarakat sosialis dan pemerataan, yang keadilannya berbeda dengan konsep keadilan yang dianut oleh kelompok kapitalis.

Karena itu, jangan sampai Marxisme kemudian dibungkus Islam. Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa mereka menggunakan ayat al-Quran, Hadits, *qawl* ulama untuk melegitimasi pemikirannya.

*Bagaimana Anda melihat hubungan agama dengan negara? Dan bagaimana seharusnya memperjuangkan agama di ruang publik?*

Perdebatan hubungan agama dan negara merupakan sebuah wacana yang sudah lama muncul dalam pemikiran Islam. Sebagai seorang sarjana Muslim, saya melihat tidak bisa dirancukan antara *al-dîn wa al-dawlah*. Pemikir-pemikir kontemporer menyebutkan bahwa *al-dîn lâ dawlah*. Padahal kalau kita membuat sebuah lingkaran dari keduanya, titik temunya dapat tercapai. Memang, terdapat wilayah masing-masing. Ada domain *al-dîn* dan ada domain *al-dawlah*. Fatwa halal-haram bukan domainnya

*al-dawlah*, tetapi domain Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebaliknya, masalah pilkada dan teknik berdemokrasi adalah domain *al-dawlah*. Namun demikian, dalam pandangan Islam harus ada moral yang menggerakkan *al-dawlah*. Inilah titik temu antara *al-dîn* dan *al-dawlah*.

Jadi, inilah yang membedakan saya dengan kelompok yang dengan tegas memisahkan *al-dîn wa al-dawlah* secara ekstrem. Al-Razi menganggap bahwa antara *al-dîn* dan *al-dawlah* seperti separuh benang merah dan separuh benang putih. Bagi saya tidak seperti itu. Meski *al-dawlah* memiliki domainnya sendiri, tetapi moral politik harus diinspirasi dari nilai-nilai agama. Sebab, tanpa moral agama hanya akan melahirkan negara ala Machiavelli. Kita tidak menginginkan menampilkan moral Machiavellian. Maka dari itu, kita menampilkan moral agama, moral Islam untuk pemeluknya, begitu juga moral Kristen untuk pemeluknya. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa saya tidak sepenuhnya sependapat dengan Al-Razi, juga tidak sepenuhnya menolak, karena ada juga pendapatnya yang masuk akal.

---

Peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat substansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn*, dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada.

---

Pada hemat saya, peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat substansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn*, dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada. Bagaimanapun undang-undang yang kita anut adalah negara “beragama”, bukan negara agama. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beragama, itu urusannya sendiri. Tetapi, kalau dia mengkampanyekan untuk tidak mau beragama, itu melanggar undang-undang. Jadi harus dibedakan di antara keduanya.

Apakah orang yang tidak beragama dapat hidup di Indonesia? Jawabannya, mereka berhak hidup di Indonesia. Tapi hanya diyakini sendiri. Mereka boleh hidup di Indonesia sepanjang dia meyakini sendiri ketidakberagamanya, tapi kalau dia mengekspos dan mengajak orang lain untuk tidak beragama, pada saat itu dia tidak berhak lagi hidup di Indonesia dan dia harus dikenakan undang-undang. Sebab, kita sudah meratifikasi *international human right* (undang-undang HAM internasional).

Tetapi harus juga dipahami bahwa HAM bukanlah cek kosong. Di seluruh dunia, tidak ada HAM yang dipahami sebagai cek kosong. Anda bisa lihat sendiri di Amerika. Masalah pornografi, misalnya, salah satu aturan di sana menyatakan tidak boleh kantor pos mengirimkan surat sampai ke rumah yang dituju kalau perangkonya menggunakan perangko telanjang. Atau, majalah telanjang juga tidak boleh dikirim. Tidak boleh majalah yang menampilkan gambar *buka-bukaan* dibuat tanpa sampul yang gelap. Berarti Amerika lebih kolot dibanding Indonesia. Sebab, di Indonesia majalah seronok dijual tanpa sampul. Iklan sabun ditayangkan setelah pukul 21.00 di Amerika. Di sini justru setelah Maghrib, karena pemirsa televisi banyaknya habis Maghrib, sambil mereka makan malam.

Jadi yang konservatif itu siapa dan yang modern itu siapa? Negara Amerika itu modern, tapi mereka hanya meratifikasi beberapa butir aturan HAM internasional. Undang-undang *human trafficking*, misalnya, tidak diratifikasi oleh Amerika. Tetapi, meskipun begitu, dia merasa menjadi polisi dunia, padahal dia paling sedikit meratifikasi undang-undang HAM internasional. Jadi secara undang-undang kita lebih liberal dibanding Amerika. Karena kita banyak meratifikasi undang-undang HAM internasional, seperti undang-undang tentang kesetaraan gender, *human trafficking*, dan sebagainya.

Tetapi, yang menjadi bahan perenungan, di era reformasi ini kita banyak meratifikasi undang-undang internasional, padahal negara-negara maju selektif sekali, seperti yang dilakukan Amerika. Karena kita mau dianggap maju maka kita meratifikasi semua, dan UUD '45 pun harus diubah. Padahal, UUD '45 sebenarnya sudah memberikan kebebasan beragama, meskipun ada juga yang membatasi HAM. Jadi HAM di Indonesia bukanlah cek kosong.

*Formalisasi dalam bentuk perda syariah yang banyak berkembang saat ini dinilai banyak kalangan mengancam kebebasan beragama, merampas hak-hak perempuan, dan HAM. Tanggapan Anda?*

Saya tidak sependapat bahwa formalisasi itu akan mengancam orang non-syariah. Saya kemarin konsultasi ke komisi XI di DPR untuk memperjuangkan undang-undang perbankan syariah. Lantas muncul

pertanyaan: Kenapa mereka harus syariah? Sungguhpun demikian, Anda atau siapapun jangan alergi dengan kata-kata syariah. Ini bukan era Piagam Jakarta dengan munculnya tujuh kata yang banyak diperdebatkan. Istilah yang muncul belakangan, adanya kata syariah, itu minus ideologi. Jadi jangan didramatisir. Memang, kawan-kawan kita di DPR menolak mentah-mentah. Walaupun sebetulnya negara yang pertama kali memformalkan syariah itu adalah negara Barat, Eropa. Di sana, di mana-mana terdapat perbankan syariah, dan itu memang sangat kontributif. Karena itu, kami sampaikan di DPR, pada waktu itu, bahwa bila teman-teman juga punya konsep hukum dan perbankan Kristen, misalnya, *monggo* kita undang-undangkan. Tetapi, kalau itu kontributif pada kesejahteraan masyarakat.

Ternyata investasi asing, terutama petrodolar tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak ada undang-undangnya. Ketika kita berhubungan bisnis dengan Timur Tengah maka masuknya melalui Malaysia, karena mereka sudah memiliki undang-undang perbankan syariah.

Jadi saya tidak setuju dengan mereka yang ikut-ikutan alergi dengan kata syariah. Mereka, menurut saya, hanya melihat kulit permukaan. Di Bulukumba, misalnya, tidak disebutkan sebagai perda syariah. Ketika saya ke daerah tersebut, saya bertanya kepada seorang Kristen, “Bu, setuju tidak dengan perda syariah?” Jawabannya: “Setuju sekali. Dulu kami tidak bisa *saving* karena pendapatan suami kami dipakai judi, sekarang karena tidak boleh berjudi, ada saldo yang bisa di-*saving*.” “Saya setuju juga dengan perda tersebut, karena bila suami sedang mabuk dia suka menempeleng, sekarang tidak ada lagi miras di jual bebas, sehingga tidak ada tamparan lagi yang mendarat ke wajah saya.” Ini yang mengatakan adalah non-Muslim.

---

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabilah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

---

*Bagaimana dengan kewajiban memakai jilbab di beberapa daerah?*

Di Bulukumba, anjuran memakai jilbab berlaku hanya di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari berkeringat, habis olahraga kemudian mandi, langsung kita salat Jumat. Jadi apa yang salah kalau dianjurkan untuk lelaki memakai baju *koko*. Sebab, kurang etis kalau salat Jumat memakai kaos dan training. Itu menyangkut masalah etika. Sementara himbuan bagi Muslimah untuk memakai jilbab sifatnya lebih berupa kesadaran, dan tidak akan dipaksa untuk memakai jilbab.

*Bagaimana dengan yang terjadi di Aceh?*

Konteks Aceh lain. Karena dia dirancang menjadi sebuah negara tersendiri, namun sekarang tidak jadi karena tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diapresiasi. Sikap saya jelas, terhadap hukum cambuk yang diberlakukan di sana, misalnya, kenapa harus takut? Kenapa hanya karena alasan tuntutan negara Islam kita lantas menjadi takut? Kalau Anda membuang sampah di Singapura, yang merupakan negara kafir, Anda akan dicambuk. Kenapa hal itu tidak ditakuti dan tidak diributkan. Ada bedanya memang, kalau di sini hukum cambuknya ada ideologi Islam sementara di sana tidak. Padahal sama-sama dicambuk.

Jadi teman-teman jangan bersikap seperti orang yang tidak punya harga diri. Misalnya, kita menganggap semuanya benar, atau sebaliknya menganggap semuanya salah. Kenapa harus takut kalau itu nilainya universal? Sedangkan soal rajam, tidak ada di sini yang menerapkan perda tentang rajam. Dan persoalan ini pun masih menjadi *ikhtilâf* di kalangan ulama.

Jadi jangan takut terhadap isu penerapan syariah. Saya ingat Romo Mangun saat bicara di PBNU. Dia mengatakan tidak alergi dengan perda syariah, karena jang-an-jang-an perda itu yang akan menjerakan koruptor. Jang-an-jang-an itu yang lebih memanusiaikan manusia.

Uskup Agung Inggris yang mendapat protes beberapa waktu lalu, pernah mengatakan: apa yang salah bila diterapkan hukum Islam di Inggris untuk orang Islam? Lantas, kenapa malah kita sendiri yang merasa keberatan dengan menerapkan hukum Islam? *Tôh* Uskup di Inggris pun mau menerapkan, dan Romo Mangun juga tidak merasa keberatan. Ini satu bukti bahwa kita kurang memiliki keberanian. Seolah-olah kita tidak berani karena menggunakan istilah formalisasi syariat Islam.

*Ketakutan terhadap syariat Islam, salah satunya, karena adanya ideologi Islam transnasional yang mengidolakan berdirinya kekuasaan Islam (khilâfah) yang tidak dibatasi dengan wilayah teritorial. Tanggapan Anda?*

*Khilâfah islâmiyah* tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis. Apa betul konsep khilâfah bisa lahir di siang bolong? Itu trauma kepada sesuatu yang tidak nyata. Kenapa harus takut kepada sesuatu yang mustahil? Sebetulnya kekhawatiran seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak punya rasa percaya diri. Sebagai seorang Muslim, menurut saya, kenapa harus ikut-ikutan takut bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari *Khilâfah* Turki atau Saudi? Lagipula negara macam apakah Arab Saudi itu?

Dalam hal ini (ketakutan) mereka jungkir balik untuk memikirkan apa yang juga dipikirkan Barat, sementara Barat sendiri sudah meninggalkan apa yang dipikirkan tersebut (*khilâfah islâmiyah*).

Dari poin ini, saya tidak setuju dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang seolah-olah bersikap “*yes man!*” terhadap Barat. Tetapi saya juga lebih tidak setuju lagi dengan orang yang keras, dengan mereka yang seolah-olah menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lain masuk neraka. Pertanyaan yang sebetulnya adalah: sudah berapa banyak dia membangun masjid, sudah berapa orang yang dia islamkan, dan berapa orang yang sudah dihajikan?

*Indonesia menganut model nation state yang berkewajiban melindungi hak-hak dan kebebasan warganya. Kalau lihat konteks sekarang, dengan berbagai benang kusut persoalan yang kita hadapi, bagaimana Anda melihat Indonesia sekarang ini?*

Saya melihat bahwa Indonesia merupakan *nation state* dengan penduduk mayoritasnya Muslim. Indonesia merupakan yang terbaik di antara negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. Saya sudah keliling ke seluruh negara Islam dan saya membuktikan bahwa kita yang terbaik. Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhatu ‘alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.



Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabilah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

*Ummah* berasal dari kata *ummun*, seakar kata dengan cinta kasih; seakar kata dengan *amâma*, terdepan, yang berperspektif; seakar kata dengan *imâm*, harus ada pemimpin yang berwibawa; seakar kata dengan *ma'mûm*, harus ada rakyat yang tunduk; seakar kata dengan *imâmah*, harus ada konsep kepemimpinan yang mengatur pemimpin dan rakyat. Dan, bingkai dari semuanya adalah *ummah*. Jadi tidak bisa disebut sebagai *ummah* kalau tidak ada lagi cinta kasih sesama, tidak ada pemimpin yang berwibawa di tempat itu, tidak ada rakyat yang santun, atau tidak ada sistem yang mengatur. Oleh karena itu, kalau hal-hal ini tidak ada, maka lebih dekat pada *qabilah*, bukan *ummah*.

Di dalam al-Quran tidak semuanya disebut *ummah*. Komunitas yang *perfect* disebut *ummah*, dan yang tidak *perfect* itulah yang disebut *qabilah*, *hizb*, *qawm*. Dan al-Quran sudah menerangkan ini.

Artinya, Nabi Muhammad lahir untuk mentransformasikan masyarakat dari sistem *qabilah* menjadi *ummah*. Apakah Indonesia ini merupakan *ummah* atau *hizb* atau *qawm*? Ini tergantung kriterianya. Kalau menurut saya, secara teori, bangsa Indonesia paling bagus. Kalau di sini Anda sebagai warga biasa bisa menjadi presiden. Tapi kalau Anda warga Arab Saudi, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin, karena Anda bukan keturunan Bani Saud. Sehingga, bagi saya, Indonesia justru lebih sesuai dengan ayat: *innâ akramakum 'indallâhi atqâkum*.

Selain itu, Indonesia telah memiliki sistem yang sangat konfiguratif, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebetulnya implemmentasi dari surat al-Ahẓâb ayat 13.

Jadi, dua-duanya saya kritik. Orang liberal, menurut saya, seringkali tampak sebagai *underbow* Barat. Mereka selaku konsumen pemikiran Barat, bukan produsen. Kita menginginkan bahwa kita menerima pemikiran yang baik dari Barat, tapi jangan ditelan mentah-mentah.

Sekarang, dengan adanya kebangkitan kelompok fundamentalis Kristen, maka Republik ini juga terancam dirugikan. Mereka yang di luar

Islam berusaha mengangkat isu agama. Sebaliknya, kita sendiri keberatan untuk menjadikan nilai-nilai Islam menjadi nafas Indonesia.

*Bagaimana soal pluralisme yang juga oleh beberapa kalangan ditanggapi miring, bahkan diharamkan oleh MUI?*

Menurut saya, pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnâkum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam. Demikianlah ketentuan dari Allah.

Jadi, hukum alam menyatakan bahwa manusia plural, berbeda-beda. Yang terlarang dalam Islam adalah *wihdat al-adyân*, penyatuan agama. *Nah* itulah yang dimaksud oleh MUI dengan pluralisme. Jadi jangan salah paham dengan MUI yang melarang pluralisme. Sekali lagi yang dilarang MUI adalah pluralisme agama. Tapi pluralisme budaya atau sosial tidak bisa diterapkan padanya aturan fikih.

Persoalannya: MUI tidak memberikan definisi operasional yang cukup atas apa yang dimaksud dengan pluralisme dalam panduannya.

Kendati demikian, saya tidak sependapat dengan tuntutan untuk membubarkan MUI. Menurut saya, posisi MUI sangat penting dalam konteks Indonesia. Hanya saja orang-orangnya harus sesuai dengan visimisinya. Jadi, jangan membakar lumbung untuk membunuh tikus. Boleh bunuh tikusnya, tapi jangan bakar lumbungnya.

Sekali lagi saya katakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan *statement* bubarkan MUI. Itu pemikiran buruk dan tanpa pertimbangan pemikiran. Yang harus dibersihkan adalah orangnya, bukan lembaganya. Ada NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya yang merupakan bagian

---

Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhathu 'alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

---

MUI. Soal kemudian di situ ada mister X, Y, atau siapapun, yang perlu dilacak adalah siapa yang suruh memilih dia? Jadi prosesnya seperti itu.

Sama juga dengan adanya pemikiran bubarkan Departemen Agama. Menurut saya, itu pernyataan ahistoris.

*Bagaimana dengan nasib minoritas di Indonesia? Apakah negara ini sudah cukup menjamin hak-hak mereka?*

Mungkin kita tidak akan bisa mengagumi Indonesia kalau kita tidak pernah ke luar negeri. Coba Anda ke Mesir, apakah Anda menemukan kemerdekaan bagi non-Muslim. Atau Anda ke Saudi, misalnya, di sana perempuan tidak bisa mendapat SIM, tapi di Indonesia bisa.

Dari 33 provinsi, 10 di antaranya dipimpin oleh non-Muslim, padahal umat Islam 90%. Jadi teman-teman jangan hipokrit terhadap Islam. Indonesia ini adalah surga bagi non-Muslim. Saya pernah lama di Amerika dan saya menjadi imam di sejumlah tempat di sana, seperti Washington DC, Virginia, dan Marryland. Bahkan kita melakukan *fund raising*, sehingga dapatlah dua rumah. Namun, setelah bertahun-tahun kita mengajukan izin pembangunan masjid ke pemerintahan Amerika, tidak pernah ada jawaban. Karena memang kita tidak boleh membangun masjid. Di Indonesia, agama mana pun dari enam agama yang ada di sini yang mengajukan rumah ibadah, asal memenuhi persyaratan, tidak ada alasan bagi pemerintah menolaknya. Coba Anda bayangkan, lebih demokratis mana?

Teman-teman di Prancis untuk masuk ke sekolah tidak boleh memakai jilbab. Di sini mayoritas Muslim, tetapi Anda ke sekolah memakai salib sebesar apapun dibolehkan. Anda ingin memakai simbol-simbol agama apapun diperbolehkan. Bukan hanya di Prancis, sekolah-sekolah di Rusia juga tidak boleh. Di Austria terdengar azan di Masjid tidak boleh, tetapi kalau lonceng di mana-mana terdengar. Di Indonesia tidak ada larangan membunyikan lonceng. Sekeras apapun. *Monggo!*

*Untuk di internal umat Islam sendiri muncul larangan dan penyesatan terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah dan Ahmadiyah. Bahkan belakangan ini nasib mereka semakin terancam?*

Siapa yang melarang? *Al-Qiyâdah al-Islâmiyah* yang dilarang adalah penyebaran ajarannya. Kalau Mushadeq mau melantik dirinya sendiri menjadi nabi dan tidak mengajak orang lain, tidak ada masalah. Pelanggarannya adalah karena dia mengajak orang lain. Buktinya umatnya banyak. Begitu juga Ahmadiyah. Dari 500 orang kemudian menjadi 50 ribu. Itu artinya ada kampanye. Mengkampanyekan sesuatu yang sesat adalah pelanggaran hukum di Indonesia.

---

*Khilâfah islâmiyah* tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis.

---

*Kriteria sesat itu seperti apa?*

Ada undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, bukan pemerintah.

*Sekarang muncul tuduhan sesat atas kelompok minoritas yang membuat mereka menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini merupakan dampak dari kurang responsifnya negara terhadap berbagai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?*

Hal itu pun menurut saya sangat relatif. Di negara kita ada aturan yang mengatur soal pendirian rumah ibadah, sementara di Amerika tidak ada, sehingga kita tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah. Apakah pemerintah Amerika memberikan syarat untuk membangun rumah ibadah? Tidak ada! Menurut saya, itu lebih aneh. Meski begitu, soal tindak anarkis, menurut saya, tidak ada tempatnya di muka bumi ini.

Yang bisa melakukan tindakan anarkis hanyalah negara yang diberikan oleh hukum, seperti melaksanakan hukuman mati. Hukuman mati adalah tindak anarki, tetapi anarki yang dibenarkan oleh hukum. Dan Amerika melakukan hal yang sama. Bahkan mereka melakukan penangkapan dan pengebosan ke tahanan tanpa proses hukum di Guantanamo. Sebetulnya yang terjadi di negeri ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Amerika.

*Di Indonesia ada UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur pokok-pokok ajaran agama. Banyak kalangan melihat bahwa UU ini tidak sesuai dengan konstitusi, yakni pasal 28 E ayat 1 dan 2, dan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?*

Coba lihat pasal berikutnya, coba lihat kembali UUD-nya. Saya tahu persis karena saya terlibat di dalamnya waktu itu. Pak Adnan Buyung Nasution hanya mengutip dua pasal itu, tapi dia tidak baca, atau pura-pura tidak tahu dengan pasal yang mengkooptasi kedua pasal itu, yaitu pasal C-nya, bahwa tidak semua HAM harus seenaknya diterapkan dengan mengatasnamakan HAM tetapi melanggar HAM yang lain. Apakah adil atas nama HAM tapi mengusir HAM umat Islam yang mayoritas, sehingga mayoritas terzalimi oleh minoritas? Jadi, Anda juga jangan bias memahaminya.

Kita salut dengan Cak Nur. Dia berani mengkritik Barat kalau memang mereka salah. Namun kita selama ini selalu menganggap yang dari Barat pasti bagus. Dalam hal ini saya salut dengan Cak Nur, begitu juga dengan Gus Dur, pikirannya liberal tetapi juga berani menabrak Barat.

Kita sekarang ini tidak punya jati diri, karena semua yang datang dari luar masuk ke dalam diri kita tanpa kita seleksi. Misalnya, ketika membicarakan tentang gender, saya tidak mengatakan bahwa semua perspektif gender dalam Islam salah dan perspektif gender orang lain semuanya benar, tapi saya harus tegas bahwa pemahaman kita selama ini terhadap ayat itu bias budaya, bias patriarki. Tapi saya juga tidak ingin ajaran di dalam al-Quran digusur. Contoh, soal poligami, saya yang berdiri paling depan untuk membatasi poligami, dari sini kemudian saya disebut liberal, tapi saya tidak pernah membuat *statement* bahwa poligami haram atau bahwa poligami itu tidak boleh. Melarang poligami sama jahatnya secara kemanusiaan.

Jadi poligami jangan dikatakan haram. Tetapi juga jangan dilonggarkan. Mengharamkan dan melonggarkan sama-sama berakibat buruk pada kemanusiaan. Tuhan telah meletakkan ayat-ayat dengan cantik: *wa in khiftum an lâ ta'dilû, fawâhidah*, di dalam kalimat itu digunakan *in*, artinya boleh ya atau boleh tidak. Jadi sangat proporsional. Kepercayaan kita sebagai Muslim harus ada dalam diri kita.

Saya salut dengan M. Dawam Rahardjo, meski dia banyak ditentang. Tapi saya tahu bahwa dia sangat menentang kapitalisme dan bagi saya dia

mempunyai kepribadian yang kuat. Bahkan dalam hal tertentu, dia *pasang badan* untuk menentang mayoritas, seperti kasus yang terjadi dalam waktu belakangan ini (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Orang yang seperti itu harus dihargai. Yang saya takutkan adalah orang yang tidak punya warna sendiri. Apa yang ada di dalam dirinya hanya duplikasi dari Barat, tidak ada tulisannya yang mencela Barat. Semua tulisannya mencela Timur. Bagi saya, orang seperti itu adalah kaki-tangan Barat. Dalam hal tertentu, saya mengajak untuk tidak seperti itu, dan ikuti hati nurani.

*Bagaimana pendapat Anda dengan Bakorpakem yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Depag, yang merupakan institusi negara yang justru dinilai banyak kalangan membatasi hak dan kebebasan beragama?*

Pertama, saya bukan anggota Bakorpakem, dan saya belum pernah diundang dalam rapat mereka. Dari Depag yang mewakili adalah Pak Atho' Mudhar, jadi saya tidak banyak tahu organ dalamnya Bakorpakem seperti apa. Tapi sepanjang yang saya ketahui, Bakorpakem bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita tidak setuju, bukan dengan membubarkan lembaganya tapi mengamandemen undang-undangnya. Sebab, yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang dan yang membuat undang-undang adalah rakyat yang diwakili DPR. Jadi bukan *an sich* negara, tapi rakyat. Eksekutornya memang pemerintah, tetapi legislatornya adalah rakyat melalui DPR. Jadi tidak bijaksana dan terlalu picik kalau hanya menyorot Bakorpakem.

Bakorpakem itu bekerja berdasarkan pasal demi pasal. Jadi jangan salahkan mereka. Salahkan DPR yang membuat undang-undangnya. Kita selalu saja potong kompas dengan menyalahkan pemerintah, sementara yang membuat undang-undangnya adalah rakyat.

---

Pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnakum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam.

---

*Bagaimana Anda melihat konsekuensi yang terjadi di masyarakat ketika Bakorpakem mengeluarkan aturan yang melarang kelompok tertentu? Dan sejauhmana Bakorpakem mempertimbangkan munculnya gejala di masyarakat?*

Karena saya baru sedikit terlibat di Depag untuk kasus semacam itu, saya belum tahu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada pemikiran untuk membubarkan langsung Ahmadiyah. Saya waktu itu salah satu anggota rapat. Di sana hadir Mendagri dan Jaksa Agung. Saya waktu itu berpendapat, apakah bijaksana membubarkan organisasi tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap organisasi itu, dan hanya berpegang pada data yang diperoleh dari lembaga yang tidak senang terhadap Ahmadiyah? Saya diprotes oleh teman-teman anggota rapat. Kalau begitu, menurut mereka, surut langkah lagi.

Sebagai orang baru di lingkungan Depag, saya memang tidak mengikuti persoalan ini dari awal. Ketika saya datang waktu itu sebenarnya tinggal menandatangani surat yang berisi pembubaran Ahmadiyah. Namun saya mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja membubarkan Ahmadiyah atau memberi waktu sebulan, dua bulan, atau tiga bulan, karena Nabi berdakwah membutuhkan waktu selama 23 tahun. Argumen saya waktu itu, percuma saja kita membubarkan organisasi formalnya, karena kita tidak bisa membubarkan keyakinannya.

Beberapa waktu kemudian saya harus menghadapi beberapa kelompok yang datang ke Depag menuntut pembubaran Ahmadiyah. Saya menemui mereka setelah selesai salat Zuhur. Satu per satu saya persilakan masuk dan bertanya. Ketika giliran saya menjawab, saya mengajak mereka untuk bersama mengingat sebuah nama dan sebuah wajah yang selalu hadir di tengah kita namun sekarang tidak lagi bisa mendampingi kita lagi, yaitu almarhum Husein Umar. Saya mengajak mereka untuk membacakan surat *al-Fâtiḥah*. Suasananya kemudian menjadi sejuk seperti disiram air. Setelah itu baru saya jawab mereka satu per satu. Inti jawaban saya, apakah kalau Ahmadiyah dibubarkan kemudian persoalannya selesai? Jawaban saya, tentu saja tidak.

Saya katakan, sebagai dirjen Bimas Islam, tugas saya tiga. Pertama, harus meminimalkan penyempalan di tubuh Islam. Karena itu, saya

meminta mereka untuk mempercayakan penanganan ini kepada saya. Kedua, para penyempal itu akan saya panggil kembali ke “rumah”. Tentu saja *bi al-maw‘izhah al-hasanah*, sesuai dengan ajaran MUI, *al-rujû‘ ilâ al-haqq*, mengembalikan mereka pada kebenaran. Konsep *al-rujû‘ ilâ al-haqq* yang digunakan Nabi perlu memakai konsep hijrah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya meminta jangan sampai ada tindakan anarkis terhadap kelompok sempalan. Tindakan anarkis dari umat Islam dalam menyikapi perbedaan adalah melanggar hukum dan menodai Islam sebagai agama perdamaian yang tidak menghendaki adanya tindakan anarkis pada siapapun.



Percakapan dengan

Neng Dara Affiah



**Neng Dara Affiah**, Komisioner dan Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Penelitian Komnas Perempuan. Ia juga Ketua PP Fatayat NU dan Konsultan untuk program Women Empowerment Moslem Context (WEMC).

---

Sekularisasi mempunyai akar teologis dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan: kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya; dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok. Semangat yang harus kita ambil dari sekularisasi adalah mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Sementara dalam liberalisme setiap individu diberikan kebebasan berekspresi dan memilih sesuai dengan hati nurani dan nalarnya sendiri dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan publik. Karena itu, di dalam negara yang demokratis, pluralisme adalah kemestian akan penghargaan, saling memahami, dan berdialog dengan masyarakat yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Bentuk konkretnya adalah bekerjasama memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan.

*Bagaimana Anda memahami sekularisme? Apakah Anda melihat perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme?*

Saya sebetulnya tidak menyukai kata ‘isme’. Kata ini mengandung paham yang memutlakkan segala bentuk ideologi, agama atau yang lainnya. Sementara dalam agama atau ideologi terdapat paradoks-paradoksnya tersendiri. Jika kita memperbincangkan sekularisasi, maka yang harus kita cermati adalah gagasan dasar atau aspek filosofisnya yang ingin mencoba memisahkan mana ranah duniawi dan mana yang wilayah agama.

Saya melihat bahwa sekularisasi sebetulnya mempunyai akar teologisnya dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan: kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya; dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok, (*I‘mal li dunyâka ka‘annaka ta‘îsyu abadan wa i‘mal li âkhiratika ka‘annaka tamûtu ghadan*). Di sini ada pesan bahwa urusan duniawi sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan agama. Jika dicampuradukkan, maka besar kemungkinan akan terjadi manipulasi terhadap agama itu sendiri.

Dalam konteks bernegara, Indonesia sebetulnya negara sekular, karena ia tidak menganut negara agama. Tetapi ia tidak sekular murni, karena dasar negara kita, Pancasila, telah menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pilar utama. Hemat saya, Indonesia sebetulnya ingin pada posisi *in between*, yakni posisi di tengah-tengah antara posisi bukan negara agama (sekular), tetapi sangat mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang perilakunya terinspirasi oleh nilai-nilai agama.

Di negara-negara Eropa dan Amerika pun demikian. Kendati mereka lantang memproklamirkan dirinya sebagai negara sekular, tetapi nilai-nilai religiusitas sangat mewarnai perilaku masyarakatnya. Negara Eropa, misalnya, secara moral dan hukum mereka terinspirasi ajaran Katolik, ilmu pengetahuan dan nalarnya terinspirasi dari kebudayaan Yunani, dan estetika dari kebudayaan Eropa itu sendiri. Amerika juga demikian. Jika kita membaca buku-buku terbitan Amerika yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nuansa nilai-nilai Protestan sangat kental sekali. Bahkan untuk buku-buku bisnis sekalipun. Tanda mata uang mereka pun memiliki semboyan “In God We Trust”.

*Semangat awal sekularisme yang terjadi di Barat adalah pemisahan antara negara dengan gereja, karena pengalaman buruk di masa lalu atas dominasi gereja. Lantas sekularisme model seperti apa yang menurut Anda harus dijalankan oleh umat Muslim?*

Sekularisme Eropa memang memiliki konteks kesejarahan tersendiri. Ia berbeda dengan konteks kesejarahan di negara-negara berbasis Muslim. Oleh karena itu, yang bisa kita ambil adalah spirit atau semangatnya, sedangkan aplikasi atau implementasinya harus kita formulasikan bersama. Turki dengan kepemimpinan baru saat ini, misalnya, mencoba memformulasikan kembali bagaimana Islam yang moderat beradaptasi dengan sekularisasi, berdialog dengan anggota-anggota Uni Eropa serta mencoba menyingkirkan sekularisme yang selama puluhan tahun diterjemahkan kalangan militer.

Proses kesejarahan sekularisme di Barat lahir karena penguasa gereja sekaligus juga penguasa negara. Terjadi tumpang-tindih mana wilayah gereja dan mana wilayah negara. Kekuasaan pun cenderung absolut, karena penguasa gereja merepresentasikan dirinya sebagai wakil Tuhan yang tidak bisa dikritik. Dari tumpang-tindih kekuasaan tersebut, maka

pelbagai gejala pun muncul pada Abad Pertengahan ini. Tapi, dari pelbagai gejala tersebut muncul manusia-manusia besar. Di Prancis, misalnya, ada Montesquieu, Voltaire, Leibniz, dan sebagainya di mana mereka bisa disebut sebagai pemikir pendobrak dari masa kegelapan Eropa menuju abad ilmu pengetahuan dan pencerahan. Teori-teori negara pun muncul pada masa ini, di antaranya teori Montesquieu yang mendobrak

---

Sekularisasi tidak berarti orang harus meninggalkan ajaran agama, melainkan ajaran agama tertentu tidak mengganggu kenyamanan penganut agama yang lain. Sekularisasi bukan berarti tidak menjunjung nilai-nilai kebaikan, mereka sangat menghargai nilai-nilai kebaikan dan memiliki nilai-nilainya tersendiri. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya sekular, tingkat korupsi mereka rendah dan pemerintahannya bersih, seperti Finlandia, Swedia, New Zealand, dan sebagainya.

---

absolutisme kekuasaan dan membagi kekuasaan melalui legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini, sekularisme Eropa melahirkan anak kandungnya yang lain, yakni ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan inilah kemudian lahir apa yang disebut sebagai Abad Pencerahan (*enlightment*).

Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa memang kesejarahan sekularisme di Barat berbeda dengan kesejarahan kita. Tetapi semangat yang harus kita ambil adalah bagaimana mereka dengan tegak mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Otoritarianisme atas nama Tuhan ini bisa terjadi pada agama manapun, tak terkecuali Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam pun berlumur kekerasan, bertarung sesama umat Islam sendiri dalam memperebutkan kekuasaan. Mereka mengucapkan lafaz yang sama atas nama Tuhan ketika mereka berupaya saling menaklukkan.

Anak kandung sekularisme di Barat adalah penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan pada gilirannya melahirkan peradaban yang besar. Dari pasca-pencerahan ini, negara-negara di mana kebijakannya berbasiskan ilmu pengetahuan menjadi maju. Banyak umat Islam dari negara-negara berbasis Muslim menjadi imigran dan menimba ilmu di negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan lain-lain.

Saat ini (ketika transkripsi wawancara ini tengah saya edit) saya sedang di New Zealand. Saya menyaksikan sendiri bagaimana umat Islam di negara ini memiliki kemerdekaannya untuk beribadah, mereka sangat rukun dengan agama lain tanpa intervensi dari pemerintah setempat, hak-hak dasar mereka benar-benar dilindungi. Negeri ini amat memperhatikan hal-hal dasar dari kebutuhan warga negara, seperti kebutuhan makanan, hak atas air bersih, hak orang untuk bekerja, hak warga negara untuk merasa aman, dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara lainnya. Bahkan imigran Muslim dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ini karena mereka merasa aman, yang mungkin tidak mereka peroleh di negerinya sendiri.

Seringkali umat Islam *phobi* dengan kata sekularisme atau sekularisasi. Mereka yang *phobi* ini apakah sudah mempelajari akar-akar filosofisnya dan proses kesejarahannya? Saya khawatir mereka yang bersikap miring ini mempelajarinya dari informasi yang kurang akurat atau dari buku-

buku yang memang paradigmanya sinis terhadap sekularisasi. Mereka ini pada umumnya kalangan apologis. Untuk memahami gagasan tersebut, sangat baik apabila kita membacanya dari literatur sejarah Eropa pada Abad Pertengahan, karya-karya filsafat yang ditulis para filosof pada abad-abad ini atau karya-karya sastranya. Ini akan memperkaya kita bagaimana pergulatan negara-negara maju membangun dirinya hingga bisa seperti sekarang ini. Sekularisasi adalah bagian dari proses tersebut.

Kembali ke pertanyaan bagaimana sebaiknya sekularisasi diterapkan di negara-negara berbasis Islam? Menurut saya, sekularisasi sebaiknya tidak menghalangi seseorang untuk komitmen atau taat menjalankan agamanya, sebagaimana yang bisa kita lihat di beberapa negara sekular yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk patuh terhadap ajaran agamanya. Dalam hal ini, sekularisasi tidak berarti orang harus meninggalkan ajaran agama, melainkan ajaran agama tertentu tidak mengganggu kenyamanan penganut agama yang lain. Sekularisasi juga bukan berarti tidak menjunjung nilai-nilai kebaikan. Dalam masyarakat yang menerapkan sekularisasi mereka sangat

menghargai nilai-nilai kebaikan dan memiliki nilai-nilainya tersendiri. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya negara sekular, tingkat korupsi mereka rendah dan pemerintahannya bersih, seperti Finlandia, Swedia, New Zealand, dan sebagainya. Hanya saja negara tidak memiliki keberpihakan terhadap

---

Saya sebetulnya tidak menyukai kata 'isme', karena kata ini mengandung paham yang memutlakkan segala bentuk ideologi, agama atau yang lainnya. Sementara dalam agama atau ideologi ada paradoks-paradoksnya tersendiri. Jika kita membicarakan sekularisasi, maka yang harus kita cermati adalah gagasan dasar atau aspek filosofisnya yang ingin mencoba memisahkan mana ranah duniawi dan mana yang wilayah agama. Saya melihat bahwa sekularisasi sebetulnya mempunyai akar teologisnya dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok, (*l'mal li dunyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa i'mal li âkhiratika ka'annaka tamûtu ghadan*).

---

agama tertentu dan ia harus dalam posisi netral, yang menjamin bahwa hak-hak agama apapun akan dilindungi, baik ia mayoritas maupun minoritas.

*Salah satu tesis yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah Islam bisa dengan mudah dipisahkan dari negara, namun tidak demikian halnya dari politik. Menurut An-Na'im, Islam akan lebih sulit untuk dipisahkan dari politik. Bagaimana tanggapan Anda?*

Mungkin an-Na'im benar bahwa Islam sulit dipisahkan dari politik, karena umat Islam mempunyai keyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang holistik atau *kâffah*, yang mengajarkan kepada umatnya mulai dari urusan rumah tangga hingga urusan bernegara. Tetapi saya mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan politik Islam? Apakah politik yang berbasis umat Islam, atau berbasis ajaran Islam? Jika berbasis umat Islam, maka pertanyaannya, Islam yang mana? Partai Islam saja di Indonesia lebih dari satu dan semuanya mengatakan partai Islam. Belum lagi variannya juga banyak, ada Islam NU, Muhammadiyah, Nahdhatul Wathan, Persis, dan lain-lain. Satu sama lain dalam memandang politik juga berbeda-beda.

Sementara jika politik berbasis ajaran Islam, maka buat saya, upaya politik yang mengedepankan pemberantasan korupsi, perlindungan dan penegakkan terhadap hak-hak dasar manusia, perempuan maupun laki-laki, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi semua warga negara, hak untuk memperoleh rasa aman di negaranya, hak semua orang untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak dan hak untuk memperoleh pendidikan, semuanya adalah politik yang berbasis ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak membantah kebenaran dari argumentasi ajaran dan hak-hak yang diperoleh oleh manusia sebagaimana yang disebut di atas.

Persoalannya, kepentingan politik dengan pendekatan hak-hak dasar manusia ini sering tidak menjadi agenda dan kepentingan partai-partai yang mengatasnamakan dirinya sebagai partai Islam. Mereka seringkali sibuk dengan permainan simbol Islam yang bersifat permukaan, sementara implementasi yang mengedepankan kepentingan dasar seluruh warga negara tanpa membedakan siapapun dan apapun agama, etnis dan

seterusnya seringkali terabaikan. Karena itu, bagi saya *sumir* dan tidak jelas apa yang dinamakan politik Islam.

Selama ini sebagian orang Islam masih terperangkap oleh simbol-simbol Islam ketika ia menyebut politik Islam, tetapi mereka kurang peduli ketika pemerintahnya korup dan menggunakan uang publik untuk kepentingan dirinya. Akhir-akhir ini, misalnya, semua kita tahu bahwa beberapa pemerintah daerah banyak yang menggunakan dana daerah untuk kepentingan kampanye pemenangan dirinya dalam pemilihan bupati atau gubernur dengan seolah-olah

kampanye anti-narkotika, sosialisasi program pemerintah, dan sebagainya, terutama mereka yang sebelumnya telah berkuasa (*incumbent*). Namun demikian masyarakat sangat jarang mempersoalkannya dan bahkan melakukan pembiaran terhadapnya. Ini berbeda dengan negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, karena mereka meyakini bahwa jika pemerintah korupsi, maka ia akan berimbas pada berbagai hal di mana yang paling dikorbankan adalah hak-hak warga negara dan berimplikasi kepada kebodohan,

kemelaratan, keterbelakangan dan tidak ada keamanan dalam negerinya. Celaknya, pemerintah yang korup ini sering menggunakan simbol-simbol Islam atau bahkan representasi penguasa dari partai Islam.

---

Di negara-negara yang masyarakatnya mempunyai paham liberal, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan yang melekat di dalamnya sangat tinggi. Dalam beberapa hal, liberalisme ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab individu terhadap Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan sebagai individu apa-apa yang telah kita perbuat selama kita hidup.

---

*Di Eropa, karena agama tidak boleh masuk ke ruang publik maka agama harus diprivatisasi. Dengan adanya privatisasi agama, trend yang kemudian muncul adalah terkikisnya peran agama dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Denmark, Prancis, dan di negara-negara Skandinavia lainnya. Apakah tidak muncul kekhawatiran bahwa jika sekularisme dijalankan di dunia Islam juga akan muncul fenomena serupa, di mana peran agama Islam semakin berkurang?*



Meskipun agama menjadi wilayah privat di negara-negara sekular, sepanjang pencermatan saya, ia tetap mewarnai domain publik. Warna tersebut bukan dalam bentuk simbolnya, melainkan pada orientasi nilai dan kesadaran umatnya yang terwujud dalam cara berpikir, berperilaku dan bersikap. Dengan demikian, sebetulnya agama tidak menjadi marjinal sebagai acuan nilai, melainkan terdapat pengaturan yang ketat terhadap penggunaan simbol-simbol agama tertentu di wilayah publik. Misalnya di beberapa negara sekular terdapat aturan yang ketat di mana fasilitas publik milik pemerintah seperti sekolah negeri, rumah sakit dan tempat-tempat umum harus “steril” dari simbol-simbol agama. Mengapa? Karena jika ada simbol agama tertentu seperti salib, maka kemungkinan umat Islam tidak merasa nyaman dengan fasilitas tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ini sangat berbeda dengan yang terjadi di kita di mana ruang-ruang publik, bahkan di jalan-jalan raya sarat dengan simbol-simbol agama mayoritas. Di Serang, Banten, misalnya, kita menyaksikan lafaz-lafaz *al-Asmâ’ al-Husnâ* mewarnai kota tersebut, padahal di antara penduduknya terdapat pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Konghucu, Budha dan Hindu. Ini mengesankan ketidakpekaan pemerintah terhadap pemeluk agama lain. Demikian pula yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Kasusnya akan berbeda kalau fasilitas tersebut milik swasta. Mereka tidak masalah menggunakan simbol-simbol agama seperti ada lambang salib di sekolah Katolik atau lambang Islam di sekolah-sekolah Islam.

*Seberapa penting sekularisasi dalam menumbuhkan gerakan perempuan?*

Pertanyaannya, sekular yang mana? Jika pemerintahannya sekular, tetapi ia bersifat militeristik, rasis, dan pemerintahannya tertutup serta otoritarian, maka sangat sulit muncul gerakan perempuan. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem yang dianut adalah sekular, tetapi ia bersifat militeristik, karena itu gerakan perempuan tidak tumbuh pada masa-masa ini. Jikapun muncul, ia bersifat oposan dan gagasan-gagasannya tidak diakomodasi oleh pemerintah. Bahkan ia sering memperoleh stigma perempuan Gerwani yang dipandang buruk pada saat itu. Sebaliknya yang dominan adalah organisasi-organisasi perempuan yang bisa bekerjasama dengan pemerintah, karena organisasi-organisasi tersebut

adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau yang menjalankan program pemerintah.

Gerakan perempuan bisa tumbuh jika negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Sebab, dalam demokrasi terdapat ruang untuk bernegosiasi dan dialog. Saat ini, misalnya, gerakan perempuan cukup berkembang dengan baik di Indonesia, karena menerapkan sistem demokrasi. Pada masa BJ Habibie telah dibentuk suatu mekanisme nasional untuk memperkecil tindak kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan yang berkomitmen pada penegakan hak-hak asasi perempuan dengan dibentuknya Komnas Perempuan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah ditetapkan kebijakan jender *mainstreaming*. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2004) telah disahkan aturan normatif yang menjadi desakan gerakan perempuan, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pelbagai kemajuan yang tumbuh di Indonesia ini seringkali menjadi contoh negara lain, misalnya Malaysia.

---

Pluralisme adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Artinya, pluralisme adalah anak kandung dari demokrasi. Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

---

Gerakan serupa terjadi pula di Iran. Meskipun negara ini berasaskan Islam, tetapi sistem pemerintahannya cukup membuka ruang dialog dan negosiasi bagi gerakan perempuan. Karena itu, beberapa isu dan agenda gerakan bisa didesakkan menjadi kebijakan pemerintah. Sedang hasilnya adalah Undang-Undang Perkawinan Iran atau hukum domestiknya sangat melindungi perempuan. Bersamaan dengan itu pula, segala bentuk pemikiran feminisme cukup berkembang di sana.

Sebuah upaya serupa juga coba dilakukan di Aceh dengan melakukan interpretasi ulang yang kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam.

Karena teks-teks keislaman sebenarnya tidak kaku, melainkan ia bisa berinteraksi dan berdialog dengan zaman. Dengan demikian, yang ingin saya katakan adalah gerakan perempuan bisa tumbuh jika negara tersebut bersifat terbuka (*open society*) dan membuka ruang demokrasi.

*Bagaimana Anda memahami Liberalisme?*

Liberalisme adalah suatu pandangan di mana manusia adalah pusat. Karena ia merupakan pusat, maka ia sangat berharga sebagai makhluk Tuhan. Pandangan ini berimplikasi kepada adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasarnya, sebagai konsekuensi atas penghargaan tersebut. Selain itu, liberalisme sangat menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada hati nurani dan nalarnya sendiri.

Seiring dengan penghargaan atas hak-hak manusia, maka pelbagai kewajiban dan aturanpun dibebankan kepadanya. Antara hak, kewajiban dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antarmanusia menyatu di dalamnya, maka lahirlah hukum. Penghargaan dan ketaatan terhadap hukum ini sangat tinggi, karena hanya dengan kekuatan hukum inilah dan ketaatan terhadapnya keteraturan dan hak-hak dasar manusia bisa terjamin.

Bertalian dengan hal tersebut, saya ingin mengoreksi pandangan bahwa liberalisme adalah kebebasan yang tanpa batas. Liberalisme justru sangat menjunjung tinggi aturan-aturan yang berupa produk hukum. Karena itu, di negara-negara yang masyarakatnya mempunyai paham liberal, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan yang melekat di dalamnya sangat tinggi.

Dalam beberapa hal, liberalisme ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab individu terhadap Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan sebagai individu apa-apa yang telah kita perbuat selama kita hidup. Seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi, mulai dari mulut, kaki, tangan, dan sebagainya. Kita tidak mengenal konsep kerahiban dan dosa kolektif di mana perbuatan individu ditanggung orang lain, kendati itu orang tua kita. Masing-masing kita adalah bertanggung jawab atas diri kita sendiri.

*Sebagai sebuah negara, Indonesia sejak awal sebenarnya memeluk sistem demokrasi liberal. Namun di sebagian kalangan umat Muslim ada pandangan bahwa demokrasi liberal adalah model baru penjajahan Barat terhadap dunia Islam dan negrara-negara Dunia Ketiga, non-Barat – karena itu pula Soekarno menentang liberalisme. Bagaimana Anda menanggapi pandangan macam ini?*

Konsep kolektivitas atau komunalisme di Indonesia memang sangat dijunjung tinggi, karena itu ia kurang menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Kepentingan bersama harus diutamakan dibanding kepentingan individu. Pandangan ini melahirkan watak “gotong royong” yang oleh Soekarno disebut sebagai watak hakiki bangsa Indonesia. Watak komunalisme atau kolektivitas ini sering dianggap sebagai ganjalan untuk penegakan hak-hak asasi manusia.

Dalam penegakan demokrasi, sebetulnya kita mempunyai modal sosial yang sangat berharga yang sudah dipraktikkan sekian lama oleh masyarakat kita, terutama di desa-desa, yakni pemilihan kepala desa secara langsung. Sekarang ini mekanisme tersebut diperluas dengan pemilihan langsung terhadap bupati, gubernur dan presiden. Jadi, pemilihan pemimpin pemerintahan secara

langsung sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebetulnya memiliki akar kultural di tengah-tengah masyarakat. Memang kita perlu melakukan perbandingan dengan negara-negara yang tidak hanya mengutamakan individu seperti negara-negara Barat, tetapi juga ke negara-negara berbasis Islam yang sudah menerapkan sistem demokrasi.

---

Memang kesejarahan sekularisme di Barat berbeda dengan kesejarahan kita. Tetapi semangat yang harus kita ambil adalah bagaimana mereka dengan tegak mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Otoritarianisme atas nama Tuhan ini bisa terjadi pada agama manapun, tak terkecuali Islam.

---

*Pluralisme sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai sebetuk sinkretisme dan relativisme. Sebagai sinkretisme, pluralisme dianggap akan mencampuradukkan akidah, sedangkan sebagai relativisme, pluralisme*

*dianggap akan merelatifkan kebenaran agama. Bagaimana Anda memahami pluralisme?*

Pluralisme adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Artinya, pluralisme adalah anak kandung dari demokrasi. Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Bentuk lain dari pluralisme adalah penghargaan, saling memahami dan berdialog dengan masyarakat yang memiliki keyakinan atau organisasi keagamaan yang berbeda. Bentuk konkretnya adalah bekerja bersama-sama untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Di beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya majemuk secara agama, wujud konkret dari pluralisme sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di antaranya tradisi yang tumbuh di beberapa daerah yang penduduknya majemuk secara agama, pluralitas begitu rupa dirayakan. Di Lombok, misalnya, ada tradisi gotong royong antara umat Hindu dengan umat Islam untuk membangun atau memperbaiki rumah bagi orang-orang miskin. Hal serupa di Flores yang mayoritas Katolik, tetapi mereka membantu umat Islam untuk membangun masjid. Di Manado juga demikian. Umat Islam di sana membantu pembangunan gereja yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen.

Kemudian apakah seorang pluralis cenderung sinkretis? Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat Diana Eck bahwa pluralisme tidak untuk menihilkan atau merelatifkan agama, melainkan agama sebagai sumber kekayaan ajaran, kekayaan nilai dan dapat memberikan inspirasi peradaban dan kemanusiaan. Seorang pluralis tidak harus sinkretis. Dia tetap bisa berkomitmen pada agamanya, tetapi akan sangat mengapresiasi dan menghargai orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ibarat yang sering saya sampaikan adalah baju orang lain bagus, tetapi ia belum tentu cocok buat kita; dan baju yang kita pakai yang menurut kita lebih bagus lagi, belum tentu bagus buat orang lain. Persepsinya tergantung si pemakai.

*Pada satu sisi, kita berhadapan dengan realitas yang plural, sementara pada sisi lain, kita menghadapi pemerintah yang tidak netral ditambah kapasitas negara lemah, akibatnya tidak jarang terjadi berbagai kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti tindak pengusiran, pengrusakan dan pembakaran properti sebagaimana dialami Ahmadiyah, komunitas Eden, gereja, dan lain sebagainya. Maka gagasan pluralisme menjadi sangat penting dan relevan di tengah kemajemukan bangsa yang belakangan kian tampak porak-poranda. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?*

Kita sebetulnya sudah meratifikasi Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya terdapat pasal bahwa setiap negara yang telah menandatangani deklarasi tersebut akan menjamin hak-hak warga negaranya untuk memeluk keyakinan apapun. Karena itu, jika mengacu kepada apa yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, maka kekerasan atau perlakuan buruk terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, perusakan gereja seharusnya tidak terjadi. Jikapun terdapat perselisihan di kalangan umat Islam mengenai apakah Ahmadiyah Islam atau bukan, maka hal tersebut adalah urusan internal umat Islam yang mungkin bisa diselesaikan di kalangan internal umat Islam sendiri. Jika hal tersebut membutuhkan bantuan pemerintah, maka pemerintah seharusnya hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator untuk mendamaikan perselisihan tersebut, tetapi tidak untuk berpihak kepada salah satunya. Sebab, jika negara sudah berpihak, maka salah satu pihak akan merasa diperlakukan tidak adil.

Pelbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat terhadap kelompok-kelompok tersebut juga berkaitan dengan

---

Liberalisme adalah suatu pandangan di mana manusia adalah pusat. Karena ia merupakan pusat, maka ia sangat berharga sebagai makhluk Tuhan. Pandangan ini berimplikasi kepada adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasarnya, sebagai konsekuensi atas penghargaan tersebut. Selain itu, liberalisme sangat menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada hati nurani dan nalarnya sendiri.

---

lemahnya hukum kita. Bagaimanapun perusakan properti yang dimiliki oleh siapapun adalah pelanggaran hukum dan tindakan kriminal. Atas kapasitas apa kita menghakimi keyakinan orang lain sebagai salah dan kita benar? Tindakan tersebut adalah se bentuk keangkuhan dan arogansi, di mana semua ajaran agama tidak membenarkan sikap tersebut.

*Dialog antaragama atau bentuk-bentuk kerjasama lain ke arah pemahaman satu sama lain atau toleransi bukanlah sesuatu hal yang baru dilakukan saat ini, melainkan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, sesering dialog itu dilakukan sesering itu pula toleransi dilanggar. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kendala adalah agama itu sendiri atautkah budaya kita yang memang tidak bisa toleran?*

Salah satu prasyarat dari dialog antaragama adalah sikap yang rendah hati untuk mengakui bahwa diri kita penuh keterbatasan, termasuk keterbatasan dengan apa yang kita yakini. Apa yang menjamin bahwa keyakinan keagamaan kita benar? Maka yang selalu harus kita upayakan adalah mencari kebenaran, tetapi kebenaran yang hakiki adalah milik Allah semata. Sikap seperti ini akan berimplikasi pada keterbukaan kita untuk menerima partikel-partikel kebenaran di luar diri kita. Di situlah kemungkinan adanya titik temu antartradisi dan antaragama.

Kegagalan dialog antaragama selama ini adalah karena dialog hanya bersifat seremonial, terkadang pemerintah yang menyelenggarakan, bukan inisiatif dari masing-masing umat beragama itu sendiri. Dialog agama yang sejati adalah dialog yang harus berangkat dari ketulusan hati masing-masing pemeluk agama bahwa kita mengakui adanya keterbatasan, tetapi sekaligus juga mempunyai pelbagai kelebihan untuk saling berbagi.

Dialog ini tidak hanya dilakukan antarpemeluk agama-agama besar saja, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, tetapi sangat perlu juga dilakukan terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal yang sudah sekian ratus, bahkan beribu tahun hidup di beberapa daerah di Indonesia. Adalah hak mereka untuk menjaga dan memelihara kepercayaannya, sebab jika tidak mereka pelihara, komunitas mereka bisa punah. Selama ini terdapat distingsi bahwa mereka bukan agama dan tampak arogansi dari sebagian orang dengan mengatakan mereka sebagai masyarakat primitif, penyembah berhala dan lainnya. Padahal, bisa jadi mereka adalah pewaris

dan penjaga tradisi dari kultur agama-agama di Indonesia yang selama ini cenderung tergerus oleh agama-agama yang oleh Huston Smith dikategorikan sebagai agama Barat (Kristen, Katolik dan Islam).

Budaya kita sebetulnya adalah budaya yang sangat terbiasa berinteraksi dengan pelbagai peradaban dan kebudayaan. Interaksi dengan India pada zaman dulu melahirkan masyarakat Hindu dan Budha yang merupakan mayoritas. Bahkan kerajaan-kerajaan Hindu pernah berjaya dan melahirkan warisan besar di negeri ini seperti Candi Borobudur dan filsafat-filsafat hidupnya. Bahkan semboyan negara kita, *Bhinneka tunggal ika*, adalah warisan dari filsafat tersebut. Demikian pula kebudayaan Islam yang dibawa oleh Gujarat dan Cina melahirkan masyarakat Islam yang saat ini mayoritas. Kebudayaan Barat yang dibawa oleh kolonial ratusan tahun lamanya juga melahirkan interaksi tersendiri yang sampai saat ini warisan tersebut masih tersisa.

---

Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

---

*Bagaimana Anda menatap Indonesia ke depan?*

*Pertama*, Indonesia harus menyembuhkan penyakit utamanya, yakni mental korupsi, terutama pemerintahannya. Mengapa? Karena korupsi ini ibarat penyakit kanker hati yang menjalar ke seluruh bagian tubuh, dan semua tubuh kita menjadi rusak karenanya. Pemerintahan yang korup akan berakibat pada terampasnya hak-hak pelayan negara untuk memperoleh gaji yang pantas dan hak-hak utama warga negara karena ketidaktersediaan dana untuk memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, makanan yang layak, yang semuanya itu berakibat pada sumber daya manusia (SDM) warga negaranya. Jika SDM masyarakat kita lemah, maka tatanan negara ini tidak akan pernah kuat,



sebagus apapun aturan yang diberlakukan. Jika masyarakatnya tidak kuat, maka jangan berharap negeri ini bisa kuat dan memiliki martabat di antara pergaulan bangsa-bangsa di dunia internasional. Kita sering sedih karena banyak TKW dan TKI kita diperlakukan tidak manusiawi di negeri orang, tetapi kita sering lupa yang terpenting dari semua itu adalah kesiapan sumber dayanya untuk bersaing dalam dunia kerja di pasar internasional.

*Kedua*, sistem demokrasi dan pilar-pilarnya harus difungsikan sebagaimana semestinya. Misalnya, bagaimana pers tetap independen dan berfungsi benar untuk mengontrol kerja pemerintah. Partai-partai politik bisa melahirkan kader-kader negarawan yang akan melahirkan calon pemimpin negara ke depan. Kuatnya *civil society* yang memiliki kemandirian dan sekaligus bisa mengontrol kebijakan negara dan implementasinya. Saat ini memang kita masih dalam proses belajar menuju ke sana. Bahwa di dalamnya kita mengalami tantangan-tantangan, maka sebaiknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar yang mungkin suatu ketika akan ditemukan kematangannya.

*Ketiga*, kita harus mampu memilih para pemimpin pemerintahan yang benar-benar mau bekerja untuk memperbaiki bangsa dan martabat masyarakat dengan segala risiko-risikonya, dan bukan untuk berorientasi status, apalagi mencari jabatan. Karena itu, ketika kita akan melakukan penjurangan calon pemimpin, maka harus ditetapkan dulu kualifikasi apa yang dibutuhkan saat ini oleh bangsa Indonesia, atau oleh daerah tertentu jika ia pemimpin daerah. Jadi, sebaiknya pemilihan pemimpin berangkat dari kualifikasi dan bukan dari orangnya.

Jika tiga hal ini saja bisa kita laksanakan, Insya Allah, ke depan Indonesia bisa lebih baik. *Wallâhu A'lam!*

Wawancara dilakukan di Pamulang, 12 Agustus 2007